

DAFTAR ISI

	ISI	Hal.
BAB I	PENDAHULUAN	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Tujuan	6
1.3	Sumber Data	7
BAB II	KONSEP DAN METODOLOGI	9
2.1	Konsep Pembangunan Manusia	9
2.2	Definisi dan Konsep Gender	13
2.3	Penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG)	25
2.4	Penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	32
Bab III	GAMBARAN UMUM	36
3.1	Geografi	36
3.2	Wilayah Administrasi	38
3.3	Jumlah dan Struktur Umur Penduduk	38
3.4	Proyeksi Penduduk	44
BAB IV	ANALISIS GENDER BIDANG PENDIDIKAN	50
4.1	Angka Partisipasi Sekolah	51
4.2	Komposisi Guru dan Kepala Sekolah	69
4.3	Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf	73
4.4	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	75
4.5	Alasan Belum/Tidak Bersekolah (lagi)	78
4.6	Akses Internet	80
BAB V	ANALISIS GENDER BIDANG KESEHATAN	83
5.1	Angka Penolong Persalinan	85
5.2	Kesehatan Ibu	87
5.3	Imunisasi	89

5.4	Pemberian ASI	95
5.5	Tingkat Kesakitan	100
5.6	Tenaga Kesehatan	102
BAB VI	ANALISIS GENDER BIDANG KETENAGAKERJAAN	106
6.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	106
6.2	Penduduk Yang Bekerja	108
6.3	Lapangan Pekerjaan/Usaha	112
6.4	Status Pekerjaan	119
6.5	Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	121
BAB VII	ANALISIS GENDER BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN	126
7.1	Politik	128
7.2	Pemerintahan	131
7.3	Keamanan	136
7.4	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	140
BAB VIII	INDEKS PEMBANGUNAN GENDER	144
8.1	Pencapaian Pembangunan Manusia	145
8.2	Pencapaian Pembangunan Gender	150
8.3	Hubungan Antara IPM dan IPG	154
8.4	Rekomendasi	157

DAFTAR TABEL

	Judul tabel	Hal
Tabel 2.1	Nilai maksimum dan Minimum Komponen IPG	31
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2011	41
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabuapten Serang Tahun 2011	43
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Usia SekolahDi Kabupaten Serang Tahun 2012	52
Tabel 4.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok UmurDi Kabupaten Serang Tahun 2011	54
Tabel 4.4	Jumlah Murid Sekolah Dasar SD per KecamatanDi Kabupaten Serang Tahun 2011/2012	61
Tabel 4.5	Jumlah Murid SLTP per KecamatanDi Kabupaten Serang Tahun 2011/2012	63
Tabel 4.6	Jumlah Murid SMU per KecamatanDi Kabupaten Serang Tahun 2011/2012	66
Tabel 4.7	Jumlah Murid SMK per KecamatanDi Kabupaten Serang Tahun 2011/2012	67
Grafik 4.1	Jumlah Murid Menurut Jenjang PendidikanDi Kabupaten Serang Tahun Ajaran 2011/2012	68
Tabel 4.8	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah SDDi Kabupaten Serang Tahun 2011/2012	69
Tabel 4.9	Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan	72

	Jenis Kelamin di Kabupaten Serang Tahun 2011	
Tabel 4.10	Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf Penduduk 15 Tahun Keatas Di Kabupaten Serang Tahun 2011	74
Tabel 4.11	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Serang Tahun 2011	76
Grafik 4.2	Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Serang Tahun 2011	76
Tabel 4.12	Persentase Penduduk 7-24 Tahun Berdasarkan Alasan Belum/Tidak Bersekolah (Lagi) di Kabupaten Serang Tahun 2011	79
Tabel 4.13	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Mengakses Internet Di Kabupaten Serang Tahun 2011	81
Tabel 5.1	Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Di Kabupaten Serang Tahun 2011	86
Tabel 5.2	Beberapa Indikator Kesehatan Ibu di Kabupaten Serang Tahun 2011	89
Tabel 5.3	Persentase Balita Yang Mendapatkan Imunisasi BCG dan Campak di Kabupaten Serang Tahun 2011	92
Tabel 5.4	Persentase Balita Yang Mendapatkan Imunisasi DPT di Kabupaten Serang Tahun 2011	93
Tabel 5.5	Persentase Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Poliodi Kabupaten Serang Tahun 2011	94

Tabel 5.6	Persentase Balita Berdasarkan Lamanya Pemberian ASI di Kabupaten Serang Tahun 2011	97
Tabel 5.7	Persentase Balita Berdasarkan Pemberian ASI Eksklusif Di Kabupaten Serang Tahun 2011	99
Tabel 5.8	Persentase penduduk yang mengalami keluhan penyakit di Kabupaten Serang Tahun 2011	101
Tabel 5.9	Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Serang Tahun 2011	103
Tabel 6.1	Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Serang Tahun 2011	107
Tabel 6.2	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Serang Tahun 2010-2011	111
Tabel 6.3	Distribusi Tenaga Kerja menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama dan Jenis kelamin di Kabupaten Serang, Tahun 2011	115
Tabel 6.4	Distribusi Tenaga Kerja menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama dan Jenis kelamin di Kabupaten Serang, Tahun 2011	117
Tabel 6.5	Distribusi Tenaga Kerja menurut Sektor Utama dan Jenis kelamin di Kabupaten Serang, Tahun 2011	118
Tabel 6.6	Distribusi Tenaga Kerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis kelamin di Kabupaten Serang, Tahun 2011	119
Tabel 6.7	Persentase Tenaga Kerja Formal dan Informal di Kabupaten Serang Tahun 2011	121
Tabel 6.8	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Serang Tahun	123

	2011	
Tabel 7.1	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Serang Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2011	130
Tabel 7.2	Jumlah Pegawai Menurut Eselon Di Pemerintahan Kabupaten Serang Tahun 2011	132
Tabel 7.3	Jumlah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2011	134
Tabel 7.4	Jumlah Pejabat Daerah di Kabupaten Serang Tahun 2011	135
Tabel 7.5	Jumlah Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Serang Tahun 2011	137
Tabel 7.6	Jumlah Pelaku dan Persentase Korban Tindak Kejahatan di Kabupaten Serang Tahun 2011	138
Tabel 7.7	Jumlah permasalahan sosial menurut jenisnya di Kabupaten Serang Tahun 2011	141
Tabel 8.1	Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Serang Tahun 2011	151
Tabel 8.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Komponen Pembentuknyadi Kabupaten Serang Tahun 2011	153
Tabel 8.3	Perkembangan IPG dan IPM Kabupaten Serang 2002-2011	155
Tabel 8.4	Perkembangan IPM dan IPG Kabupaten/Kota se Provinsi Banten tahun 2004-2011	157

DAFTAR GRAFIK

	Judul Grafik	Hal
		.
Grafik 3.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2011	40
Grafik 3.2	Piramida Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2011	44
Grafik 3.3	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Serang Tahun 2010	45
Grafik 3.4	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Serang Tahun 2020	46
Grafik 3.5	Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Serang Tahun 2025	46
Grafik 8.1	Perkembangan IPM dan IPG Kabupaten Serang 2004-2011	156

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Visi Kabupaten Serang adalah Terwujudnya Masyarakat yang Berkualitas menuju Kabupaten Serang yang Agamis, Adil dan Sejahtera, serta salah satu misinya adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlaqulkarimah dan berbudaya. Meskipun demikian, untuk dapat menciptakan kondisi tersebut ada beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki serta masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka telah ditetapkan sasaran pembangunan yang salah satu diantaranya adalah menurunnya

kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki, yang diukur oleh angka *Gender-related Development Index* (GDI) dan *Gender Empowerment Measurement* (GEM).

Kualitas hidup perempuan menjadi penting untuk dibahas, mengingat bahwa kualitas hidup perempuan sangat menentukan kualitas hidup generasi mendatang. Jelasnya, kualitas hidup generasi mendatang ditentukan oleh kondisi pendidikan dan kesehatan perempuan saat ini. Hal ini terasa semakin penting ditengah otonomi daerah dan Kabupaten Serang semakin mampu untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas. Komitmen pemerintah daerah dalam memberdayakan perempuan dibuktikan dengan dimasukkannya sasaran peningkatan kualitas hidup perempuan yang ingin dicapai dalam pembangunan.

Atas dasar itu, cukup relevan jika kita bertanya sampai seberapa besar tujuan dalam peningkatan kualitas hidup perempuan telah dicapai? Apakah bias gender dalam kualitas hidup semakin berkurang? Namun sebelum sampai pada penilaian terhadap kualitas hidup secara keseluruhan, perlu juga dipertanyakan tentang perkembangan berbagai indikator yang melatarbelakangi capaian kualitas hidup perempuan dan laki-laki.

Ketersediaan data statistik yang dirinci menurut jenis kelamin sangat penting dalam perencanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender. Dengan menggunakan statistik gender, pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan diharapkan dapat tepat sasaran dan tepat guna sehingga

memberikan dampak yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, sebagian besar proses pembangunan berada di tangan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemahaman tentang kondisi daerah setempat sangatlah diperlukan, khususnya dalam upaya pembangunan pemberdayaan perempuan, melalui penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin di berbagai bidang untuk tingkat kecamatan di Kabupaten Serang. Statistik gender dapat pula menggambarkan isu gender yang selama ini masih terabaikan atau belum digarap secara optimal.

Publikasi ini, secara spesifik, untuk mengetahui:

- 1) Perkembangan kondisi sosial ekonomi terpilah laki-laki dan perempuan
- 2) Perkembangan kualitas hidup penduduk secara keseluruhan yang digambarkan

dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kualitas hidup perempuan yang digambarkan dengan Indeks Pembangunan yang berkaitan dengan gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan penyusunan Indeks Pembangunan Gender adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menyusun data terpilah menurut jenis kelamin dan isu-isu prioritas terkait pembangunan gender dan pemberdayaan perempuan
- 2) Menyediakan data capaian pembangunan gender berupa Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

1.3 Sumber Data

Data yang diperoleh merupakan data statistik gender di seluruh kecamatan di Kabupaten Serang yang disajikan dalam bentuk data kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, hukum, dan sosial budaya. Data tersebut diperoleh dari beberapa dinas/badan terkait, kecamatan dan hasil sensus/survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, yaitu Sensus Penduduk, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

BAB II KONSEP DAN METODOLOGI

2.1 Konsep Pembangunan Manusia

Dalam Perencanaan Pembangunan dewasa ini, pembangunan manusia senantiasa berada di garda terdepan. Pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya kearah perluasan pilihan dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990). Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang utama adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Diantara pilihan lain yang tak kalah pentingnya adalah

kebebasan politik, jaminan atas hak asasi manusia dan harga diri. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia, seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya, untuk menikmati kehidupan, melakukan kegiatan produktif, atau ikut serta dalam berbagai kegiatan budaya, dan sosial politik. Pembangunan manusia harus menyeimbangkan berbagai aspek tersebut.

Pembangunan manusia mensyaratkan adanya keterbatasan. Tujuan utama dari pembangunan manusia yaitu memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia, tidak mungkin tercapai tanpa adanya kebebasan untuk memilih apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka menjalani kehidupan. Manusia harus bebas untuk melakukan

apa yang menjadi pilihannya di dalam sistem pasar yang berfungsi dengan baik, dan mereka harus memiliki suara yang menentukan dalam membentuk kerangka politik mereka. Orang memiliki kebebasan politik dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang dilakukan dalam kerangka aturan-aturan yang demokratis menuju konsensus dan konsolidasi.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat; pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu Gender. Dengan

demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Pembangunan manusia mempunyai empat elemen, yaitu produktifitas, pemerataan, berkelanjutan dan pemberdayaan. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas manusia akan meningkat sehingga mereka akan menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemeratan kesempatan harus tersedia baik untuk generasi sekarang maupun generasi penerus. Semua orang, perempuan ataupun laki-laki harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka.

2.2 Definisi dan Konsep Gender

Gender berasal dari bahasa latin, yaitu "geanus" berarti tipe atau jenis. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya setempat, maka Gender tidak berlaku selamanya tergantung kepada waktu (*trend*) dan tempatnya. Sebagai contoh : kalau dulu hanya perempuan yang menggunakan anting-anting, tren akhir-akhir ini ternyata banyak juga laki-laki yang menggunakan anting-anting. Gender juga sangat tergantung kepada tempat atau wilayah, misalnya kalau di sebuah desa, perempuan memakai celana panjang dianggap tidak pantas, maka ditempat lain bahkan sudah jarang menemukan perempuan memakai rok. Karena bentukan pola, maka Gender bisa dipertukarkan. Misalnya kalau dulu pekerjaan memasak selalu

dikaitkan dengan perempuan, maka sekarang ini sudah mulai banyak laki-laki yang turut aktif mengurus dapur atau tidak lagi tergantung kepada perempuan agar tidak kelaparan.

Gender berbeda dengan sex

Gender ditentukan oleh sosial dan budaya setempat sedangkan sex adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan oleh Tuhan.

Gender

Semua atribut sosial mengenai laki-laki dan perempuan, misalkan laki-laki digambarkan memiliki sifat maskulin seperti keras, kuat, rasional, gagah; sementara perempuan digambarkan memiliki sifat *feminism* seperti halus, lemah, perasa, sopan, penakut. Perbedaan tersebut dipelajari dari keluarga, teman, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan dan

kebudayaan, sekolah, tempat kerja periklanan dan media.

Isu Gender

Masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki. Biasanya isu Gender muncul sebagai akibat suatu kondisi yang menunjukkan perbedaan Gender.

Sensitivitas Gender

Kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan, dan berfikir tentang adanya kesenjangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Sensitivitas Gender diharapkan mampu menjadi alat untuk melihat ketidakadilan yang muncul berkaitan dengan hubungan antara

perempuan dan laki-laki diranah domestik maupun publik.

Buta Gender

Tidak adanya pemahaman dan kesadaran dalam diri seseorang bahwa Gender adalah faktor kultural yang mempengaruhi pilihan-pilihan hidup yang tersedia baginya dalam masyarakat.

Disparitas/ Kesenjangan/ Ketimpangan Gender

Suatu kondisi yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ketidakseimbangan ini terjadi dalam pekerjaan, pendapatan, kesempatan, dan penghargaan.

Peran Gender

Peran sosial yang diakibatkan oleh perbedaan jenis kelamin, misalnya peran

mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga dianggap sebagai tugas dan tanggung jawab perempuan, padahal peran tersebut bagi perempuan bukan kodrat melainkan konstruksi sosial sehingga laki-laki pun sebenarnya dapat melakukannya.

Kesetaraan Gender

Persamaan kondisi dan status antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak seorang pun yang terabaikan kesempatan dan hak asasinya. Keduanya diberikan kesempatan untuk maju dan berkembang secara sama, tidak ada jenis kelamin yang lebih utama atau diprioritaskan.

Analisis Gender

Suatu analisis yang digunakan oleh perencana/ pembuat kebijakan untuk menilai

dampak kebijaksanaan yang bergerak bagi perempuan dan laki-laki atas program atau peraturan yang diusulkan dan dilaksanakan.

Persepektif Gender

Mengkaji masalah-masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya dari sudut pandang yang mempertimbangkan keberadaan laki-laki dan perempuan. Lebih jauh lagi, perspektif Gender menganalisis bagaimana kebijakan ekonomi, politik, sosial dan budaya berproyeksi mempengaruhi terjadinya diskriminasi yang didasarkan pada jenis kelamin.

Gender Responsif

Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan mengacu pada rasa keadilan.

Pengarusutamaan Gender

Usaha agar kebijakan apapun yang dikeluarkan pejabat pemerintah dan swasta (baik dalam bentuk kebijakan, undang-undang, peraturan, maupun kebijakan yang bersifat teknis) harus selalu mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan Gender. Kebijakan ini harus diterapkan mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan sampai pada tahap evaluasi.

Bentuk hubungan Gender

Hubungan Gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dengan perempuan yang bersifat saling membantu atau sebaliknya serta memiliki banyak perbedaan dan ketidaksetaraan. Hubungan Gender berbeda dari waktu ke waktu dan antara masyarakat satu dengan masyarakat lain, akibat perbedaan suku, agama, status

sosial maupun nilai (tradisi dan norma yang dianut).

Ketidakadilan Gender

Ketidakadilan Gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan alasan Gender, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak azasnya, persamaan antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain-lain. Ketidakadilan Gender terjadi apabila ada diskriminasi terhadap akses dan kontrol antara perempuan dan laki-laki dalam hal perilaku, peran, tugas, hak dan fungsi yang harus dijalankan. Misalnya perempuan dan laki-laki tidak diberi kesempatan pendidikan, pekerjaan, kesehatan yang seharusnya.

Sifat ketidakadilan Gender

Ketidakadilan Gender dapat bersifat:

- Langsung, yaitu perbedaan perlakuan secara terbuka, baik disebabkan perilaku/ sikap, norma atau nilai, maupun aturan yang berlaku.
- Tidak langsung, seperti peraturan sama, tetapi pelaksanaannya menguntungkan jenis kelamin tertentu.
- Sistemik, yaitu ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, norma atau struktur masyarakat yang mewariskan keadaan yang bersifat membedakan.

Bentuk- bentuk diskriminasi Gender

Memperlakukan seseorang atau kelompok orang secara berbeda karena alasan jenis kelamin, umur, ras, atau agama. Diskriminasi atas dasar jenis kelamin disebut *sexism*, sedangkan diskriminasi atas dasar peran, fungsi, hubungan laki-laki dan perempuan disebut diskriminasi Gender, diantaranya adalah:

- Marginalisasi (peminggiran). Peminggiran banyak terjadi dalam bidang ekonomi. Misalnya banyak perempuan hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak terlalu bagus, baik dari segi gaji, jaminan kerja ataupun status dari pekerjaan yang didapatkan. Hal ini terjadi kemungkinan karena masih sedikit perempuan yang mendapatkan peluang pendidikan.

Peminggiran dapat terjadi di rumah, tempat kerja, masyarakat, bahkan oleh Negara yang bersumber keyakinan tradisi atau kebiasaan, kebijakan pemerintah, ataupun asumsi-asumsi ilmu pengetahuan (teknologi).

- Subordinasi (penomorduaan), anggapan bahwa perempuan lemah, tidak mampu memimpin, cengeng dan lain sebagainya, mengakibatkan perempuan jadi dinomorduakan setelah laki-laki.
- Stereotip (citra buruk) yaitu pelabelan negatif yang diberikan masyarakat kepada jenis kelamin tertentu, umumnya terhadap perempuan. Sebagai contoh, masyarakat menganggap laki-laki itu rasional, kuat, aktif, dan sebagainya. Sebaliknya, perempuan itu emosional, penakut,

penakut, pasif dan sebagainya. Stereotip ini kemudian menjadi dasar untuk membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Misalnya perempuan tidak pantas menjadi pemimpin karena dalam mengambil keputusan lebih mengandalkan perasaan daripada rasio.

- *Violence* (Kekerasan) yaitu serangan fisik dan psikis. Perempuan pihak paling rentan mengalami kekerasan, dimana hal itu terkait dengan marginalisasi, subordinasi maupun stereotip diatas. Perkosaan, pelecehan seksual atau perampokan merupakan contoh kekerasan paling banyak dialami perempuan.
- Beban kerja berlebihan, yaitu tugas dan tanggung jawab perempuan yang berat dan terus menerus. Misalnya, seorang

perempuan selain melayani suami, hamil, melahirkan, menyusui, juga harus menjaga rumah. Disamping itu kadang ia juga ikut mencari nafkah, dimana hal tersebut tidak berarti menghilangkan tugas dan tanggung jawab diatas.

2.3. Penghitungan Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur rata-rata pencapaian secara umum dan oleh karenanya menyembunyikan perbedaan tingkat pembangunan manusia yang dicapai oleh laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur tingkat pencapaian dalam kemampuan dasar sama seperti IPM yaitu: Angka harapan hidup, tingkat pendidikan dan pendapatan dengan penyesuaian untuk

memperhitungkan ketimpangan Gender seperti halnya IPM, IPG (*Gender-related Development Index* atau GDI) maupun (*Gender Empowerment Measure* atau GEM) merupakan indeks komposit yang terdiri dari sejumlah komponen atau variabel. Berbeda dengan IPM, IPG memperhitungkan ekstensi ketidaksamaan aversi yang ditunjukkan oleh parameter X_{ede} . Sebagai suatu parameter X_{ede} menunjukkan elastisitas marginal valuasi sosial terhadap suatu pencapaian, dan memperlihatkan kecepatan turunnya nilai marginal akibat kenaikan pencapaian.

Untuk menghitung IPG terlebih dahulu dihitung nilai X_{ede} . Nilai tersebut menunjukkan ukuran capaian yang terdistribusikan secara sama (*equally distributed equivalent achievement*).

X_{ede} Merupakan suatu tingkat capaian yang sama antar jenis kelamin.

($X_f = X_{ede}$ dan $X_m = X_{ede}$) dari masing-masing komponen, dihitung menggunakan persamaan :

$$X_{ede} = (P_f X_f^{(1-\alpha)} + P_m X_m^{(1-\alpha)})^{1/(1-\alpha)} \dots\dots\dots (1)$$

dimana :

X_f : Menunjukkan capaian perempuan

X_m : Menunjukkan capaian laki-laki

P_f : Proporsi penduduk perempuan

P_m : Proporsi penduduk laki-laki

Ekstensi ketidaksamaan aversi yang dalam laporan ini ditetapkan $\alpha = 2$

Khusus untuk komponen indeks distribusi pendapatan dihitung dengan tahapan sebagai berikut :

- Menghitung rasio upah perempuan terhadap upah laki-laki di sektor non pertanian (W_f)
- Menghitung upah rata-rata (W) dengan rumus :

$$W = Aec_f(W_f) + Aec_m \cdot (1) \dots\dots\dots (2)$$

dimana :

Aec_f : Proporsi tenaga kerja (aktif secara ekonomi) perempuan

Aec_m : Proporsi tenaga kerja (aktif secara ekonomi) laki-laki

W_f : rasio upah perempuan di sektor non pertanian

- Menghitung rasio upah masing-masing jenis kelamin terhadap upah rata-rata (W) ($=R$)

- Menghitung sumbangan pendapatan (IncS) untuk masing-masing jenis kelamin dengan rumus :

$$\text{IncS} = \text{Aec} \left(\frac{f}{m} \right) \cdot \text{R} \left(\frac{f}{m} \right) \dots \dots \dots (3)$$

- Menghitung proporsi sumbangan pendapatan (% IncS) untuk masing-masing jenis kelamin dengan rumus:

$$\% \text{ IncS} = \text{IncS} \left(\frac{f}{m} \right) / \text{P} \left(\frac{f}{m} \right) \dots \dots \dots (4)$$

- Menghitung X_{ede} dari % IncS ($=X_{ede}(\text{Inc})$)

- Menghitung indeks distribusi pendapatan (IDisInc) dengan rumus :

$$\text{IDisInc} = [(X_{ede}(\text{inc}) \cdot \text{PPP}) - \text{PPPmin}] / [\text{PPPmaks} - \text{PPPmin}] \dots (5)$$

Akhirnya angka IPG dapat dihitung menggunakan persamaan :

$$IPJ = 1/3[X_{ede}(1) + X_{ede}(2) + IDisInc] \dots \dots (6)$$

dimana :

$X_{ede} (1)$: X_{ede} angka harapan hidup

$X_{ede} (2)$: X_{ede} pendidikan

IDisInc : Indeks distribusi pendapatan

Sumber data yang digunakan untuk menghitung IPG sama dengan sumber data IPM. Data upah yang diperlukan untuk menghitung X_{ede} standar hidup layak dalam IPG digunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Penghitungan IPG dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- Menghitung indeks setiap komponen untuk masing-masing jenis kelamin dengan batasan

maksimum dan minimum seperti dalam Tabel 2.1.

- Menghitung nilai X_{ede} dari hasil penghitungan indeks pada tahap pertama menggunakan persamaan (1)
- Menghitung IPG menggunakan persamaan (6)

Tabel 2.1.
Nilai maksimum dan Minimum Komponen IPG

Indikator Komponen IPG[$X_{(i)}$]	Nilai Maksimum $X_{(i)}$		Nilai Minimum $X_{(i)}$		Catatan
	Laki- laki	Perem- puan	Laki- laki	Perem- puan	
Angka Harapan Hidup	82,5	87,5	22,5	27,5	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	100,0	100,0	0,0	0,0	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah	15,0	15,0	0,0	0,0	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per Kapita yang disesuaikan	732.720 ^a		300.000 ^b		UNDP menggunakan GDP perkapita riil yang disesuaikan

Catatan:

- a) Proyeksi pengeluaran riil /unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi(Jakarta) pada tahun 2018 setelah

disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen pertahun selama kurun 1993 - 2018

- b) Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang mewakili angka terendah tahun 1990 di daerah pedesaan (Sulawesi Selatan)

2.4 Penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Komponen IDG terdiri dari Indeks keanggotaan DPR (parlemen), Indeks pengambilan keputusan dan Indeks distribusi pendapatan. Untuk menghitung IDG terlebih dahulu dihitung X_{EDEP} yaitu indeks untuk setiap komponen berdasarkan EDEP (Equally Distributed Equivalent Percentage), dengan persamaan (3). Penghitungan distribusi pendapatan dalam

IDG sama persis dengan dilakukan dalam IPG. Sebagai catatan, UNDP dalam menghitung Indeks Distribusi Pendapatan untuk IDG menggunakan PDB per kapita yang belum disesuaikan.

Indeks masing-masing komponen IDG merupakan hasil bagi antara X_{edep} dengan 50. Angka 50 merupakan rasio jenis kelamin yang dianggap ideal bagi anggota parlemen, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, atau tenaga professional dan teknisi.

Unsur pengambi keputusan (PK) adalah tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, dan Tenaga professional dan Teknisi. Dalam IDG nasional IPK merupakan indeks dari gabungan dua indeks masing-masing komponen PK. Penggabungan dua jenis jabatan dalam IDG nasional semata-mata dilakukan untuk

menghindari kesalahan klasifikasi (akibat kesalahan persepsi responden) terhadap kedua jenis jabatan tersebut. Data komponen PK dalam laporan ini menggunakan data susenas. Data keanggotaan DPR menggunakan data dari Lembaga Pemilihan Umum.

Penghitungan IDG dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$IDG = 1/3 (Ipar + IPK) + IdsInc$, Dimana :

- Ipar : Indeks keanggotaan parlemen
- IPK : Indeks pengambil keputusan
- IdsInc : Indeks distribusi pendapatan

BAB III GAMABARAN UMUM

3.1 Geografi

Secara geografis wilayah Kabupaten Serang sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, Kota Cilegon dan Kota Serang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang, di sebelah selatan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kota Cilegon dan Selat Sunda.

Letak geografis yang demikian merupakan keuntungan bagi Kabupaten Serang. Kabupaten Serang merupakan pintu gerbang atau transit perhubungan darat antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selain itu dengan posisinya yang hanya berjarak ± 70 km dari Kota Jakarta,

Kabupaten Serang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara.

Secara topografi, Kabupaten Serang merupakan wilayah dataran rendah dan pegunungan dengan ketinggian antara 0 sampai 1.778 m di atas permukaan laut. Sebagian besar dataran rendah memiliki ketinggian kurang dari 500 meter, sementara dataran tinggi berupa rangkaian pegunungan yang terdapat di perbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

Wilayah Kabupaten Serang beriklim tropis dengan curah hujan dan hari hujan banyak di sepanjang tahun 2011. Curah hujan dalam sebulan rata-rata 6 mm dan lama hujan 14 hari. Suhu berkisar antara 23,8°C - 32,0°C, dan kelembaban relatif menurun dibanding tahun sebelumnya. Sekitar 73 persen dari luas

wilayah keseluruhan Kabupaten Serang digunakan untuk lahan di sektor pertanian.

3.2 Wilayah Administrasi

Pada tahun 2011, Wilayah administrasi Kabupaten Serang terdiri atas 28 kecamatan, 314 desa, 1.427 RW dan 5.281 RT. Seluruh desa di Kabupaten Serang tidak ada satupun yang berstatus kelurahan, seluruhnya masih berstatus desa, sehingga kepala desa dipilih oleh masyarakat setempat. Menurut perkembangan wilayah, hanya 32 desa yang berstatus wilayah urban (perkotaan) sedangkan 282 desa lainnya masih kategori perdesaan.

3.3 Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Dalam GBHN dikemukakan bahwa penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan. Sebagai subyek pembangunan maka penduduk harus dibina dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan. Sebaliknya, pembangunan

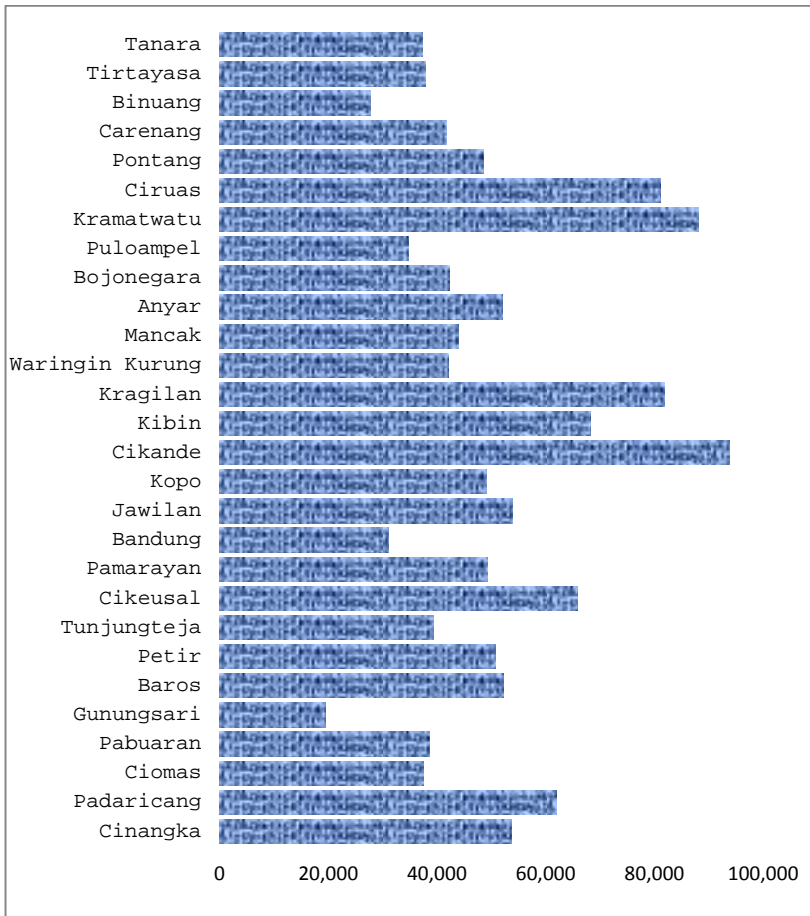
juga harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan.

Penduduk adalah seluruh orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Serang selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Tahun 2011, Kabupaten Serang didiami oleh 1.423.696 jiwa yang terdiri dari 50,9 persen penduduk laki-laki dan 49,1 persen perempuan dengan penambahan penduduk sebesar 1,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 1980, wilayah Kabupaten Serang dihuni oleh sekitar 724.381 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Setelah 3 dasawarsa kemudian (tahun 2010) penduduk Kabupaten bertambah hanya sebesar 344.824 jiwa saja artinya rata-rata

pertambahan penduduk pertahun selama 30 tahun tersebut hanya 2,23 persen.

Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2011



Tabel 3.1 Jumlah Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Serang Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex rasio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cinangka	27.929	25.676	53.605	109
2	Padaricang	31.902	30.041	61.943	106
3	Ciomas	19.385	18.131	37.516	107
4	Pabuaran	20.031	18.578	38.609	108
5	Gunungsari	10.144	9.355	19.499	108
6	Baros	27.335	24.816	52.151	110
7	Petir	25.565	25.122	50.687	102
8	Tunjungteja	19.985	19.343	39.328	103
9	Cikeusal	33.068	32.723	65.791	101
10	Pamarayan	25.065	24.271	49.336	103
11	Bandung	15.831	15.162	30.993	104
12	Jawilan	27.750	26.115	53.865	106
13	Kopo	25.194	23.816	49.010	106
14	Cikande	47.927	45.838	93.765	105
15	Kibin	28.069	40.178	68.247	70
16	Kragilan	42.053	39.762	81.815	106
17	Waringin Kurung	21.638	20.459	42.097	106
18	Mancak	22.836	21.105	43.941	108
19	Anyar	26.705	25.361	52.066	105
20	Bojonegara	21.650	20.577	42.227	105
21	Puloampel	17.836	16.820	34.656	106
22	Kramatwatu	45.323	42.812	88.135	106
23	Ciruas	41.412	39.699	81.111	104
24	Pontang	25.462	23.126	48.588	110
25	Carenang	21.272	20.475	41.747	104
26	Binuang	13.986	13.799	27.785	101
27	Tirtayasa	19.716	18.165	37.881	109
28	Tanara	19.227	18.075	37.302	106
Jumlah		724.296	699.400	1.423.696	104

Jumlah penduduk yang besar merupakan asset suatu wilayah dan seharusnya asset

tersebut memberi dampak positif bagi daerah bukan menjadi beban bagi daerah tersebut. Kecamatan Cikande adalah sebuah kecamatan yang berada di wilayah Serang Timur memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 93.765 jiwa diikuti oleh Kecamatan Kramatwatu, Kragilan dan Ciruas. Kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Gunungsari dan Binuang. Kecamatan Kibin memiliki sex ratio sebesar 70, artinya dari 70 orang laki-laki terdapat 100 perempuan dan sex ratio ini berbeda dengan kecamatan yang lain dengan sex ratio di atas 100.

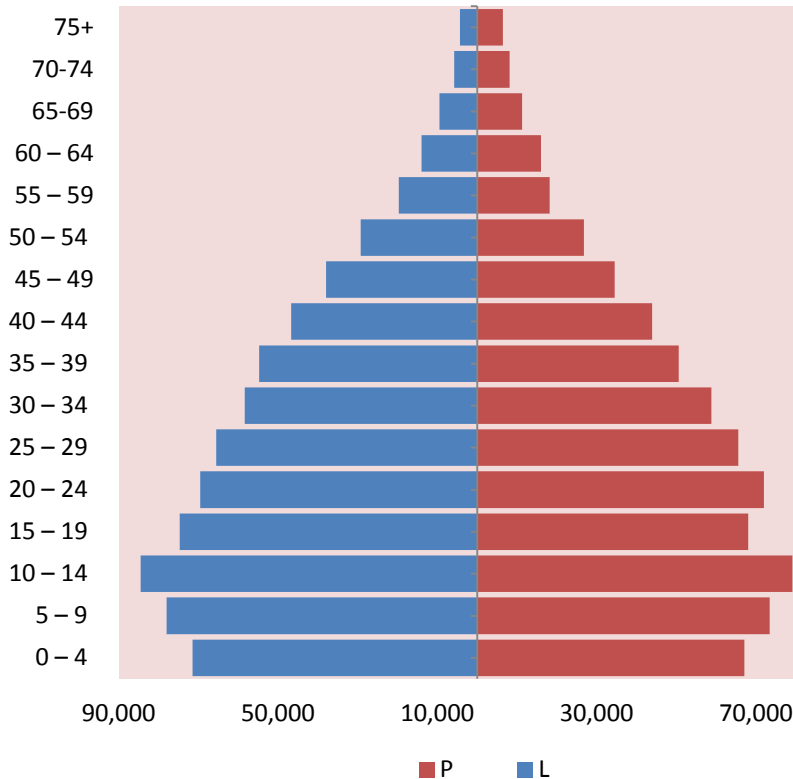
Struktur penduduk memberikan gambaran bagaimana komposisi penduduk yang ada di Kabupaten Serang menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Struktur kelompok umur menginformasikan beberapa sumber daya manusia produktif dan yang tidak produktif. Struktur

umur muda masih mendominasi komposisi penduduk Kabupaten Serang, namun tampak pula bahwa kelompok umur produktif juga cukup banyak terutama pada usia 20-24 tahun.

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Serang Tahun 2011

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
0 - 4	71.455	67.020	138.475
5 - 9	78.031	73.386	151.417
10 - 14	84.523	79.116	163.639
15 - 19	74.705	67.996	142.701
20 - 24	69.548	71.975	141.523
25 - 29	65.556	65.534	131.090
30 - 34	58.360	58.779	117.139
35 - 39	54.784	50.582	105.366
40 - 44	46.743	43.869	90.612
45 - 49	37.938	34.477	72.415
50 - 54	29.302	26.749	56.051
55 - 59	19.731	18.133	37.864
60 - 64	14.013	15.955	29.968
65 - 69	9.463	11.237	20.700
70 - 74	5.808	8.122	13.930
75 +	4.372	6.434	10.806
Jumlah	724.332	699.364	1.423.696

Grafik 3.2 Piramida Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2011

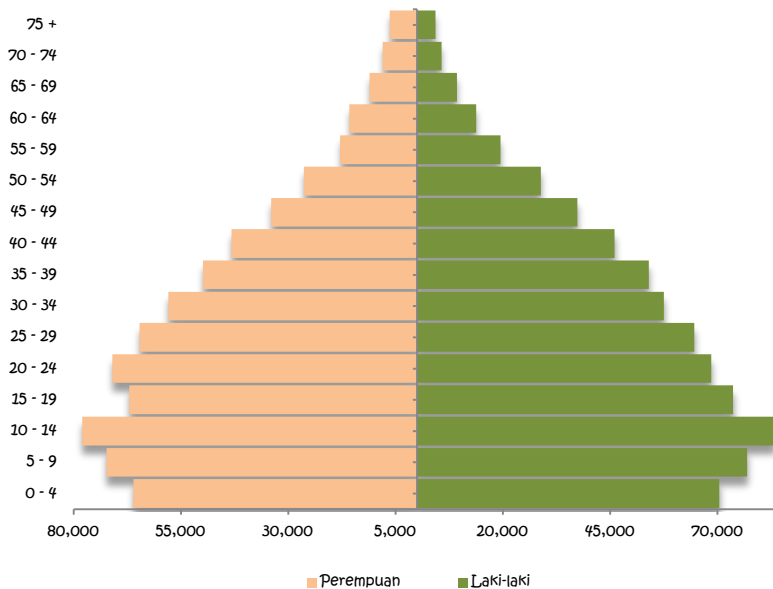


3.4 Proyeksi Penduduk

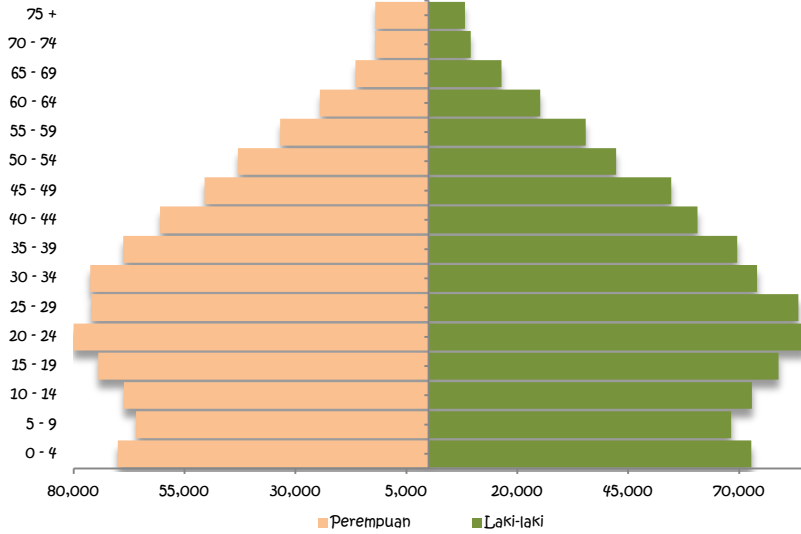
Dalam rangka pembangunan di segala bidang, diperlukan informasi mengenai keadaan

penduduk seperti jumlah penduduk, persebaran penduduk, dan susunan penduduk menurut umur. Informasi yang harus tersedia tidak hanya menyangkut keadaan pada saat perencanaan disusun, tetapi juga informasi masa datang dengan membuat suatu proyeksi yaitu perkiraan jumlah penduduk dan komposisinya di masa mendatang.

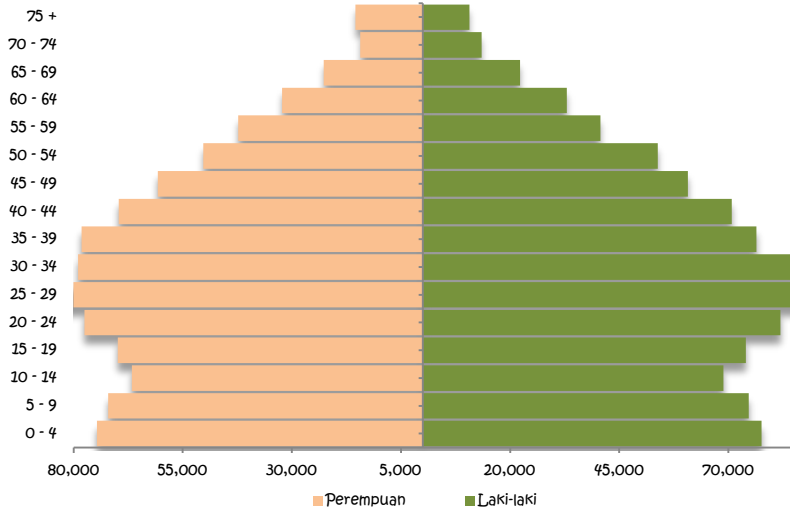
Grafik 3.3 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Serang Tahun 2010



Grafik 3.4 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Serang Tahun 2020



Grafik 3.5 Piramida Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Serang Tahun 2025



Tiga buah piramida di atas menggambarkan perubahan komposisi dan pergerakan pada masing-masing kelompok umur penduduk. Pada tahun 2010, komposisi umur muda (0-14 tahun) cukup besar dibandingkan kelompok umur di atasnya, namun sejalan dengan perubahan waktu maka terjadi pergeseran komposisi umur dimana kelompok umur produktif semakin menonjol pada tahun 2020 dan 2025. Proyeksi ini telah memperhitungkan kelahiran, kematian dan migrasi.

Artinya, pergeseran komposisi umur penduduk di masa mendatang harus menjadi perhatian karena apabila penduduk usia produktif seperti 15 hingga 40 tahun semakin besar jumlahnya tetapi tidak diiringi dengan bertambahnya lapangan pekerjaan maka akan terjadi pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bersiap

untuk merencanakan kebijakan pembangunan di masa depan dengan memperhatikan komposisi umur dan jenis kelamin penduduk.

BAB IV ANALISIS GENDER BIDANG PENDIDIKAN

Menurut UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran" juga dalam deklarasi hak-hak asasi manusia pasal 26 dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak mendapatkan pengajaran". Terkait hal tersebut diatas, sesungguhnya ketika dunia pendidikan bukan hanya dianggap dan dinyatakan sebagai unsur utama dalam upaya pencerdasan bangsa melainkan juga sebagai produk atau konstruksi sosial, maka dengan demikian pendidikan juga memiliki andil bagi terbentuknya relasi gender di masyarakat.

Pendidikan merupakan syarat utama pembangunan kapabilitas dasar manusia. Melalui pendidikan, khususnya pendidikan formal, seseorang dapat meningkatkan pengetahuannya.

Jelasnya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai seseorang, semakin berpotensi dalam pengembangan diri untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Bagi perempuan pendidikan tinggi akan memiliki dampak yang sangat positif. Selain dapat memberdayakan diri, pendidikan juga dapat membebaskan perempuan dari belenggu budaya yang cenderung menguntungkan laki-laki. Dengan tingkat pendidikan yang lebih baik, perempuan diharapkan mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya guna untuk kepentingan

4.1. Angka Partisipasi Sekolah

Akses dan pemerataan pendidikan dapat dilihat dari partisipasi penduduk usia sekolah 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun yang terinci menurut jenis kelamin. Berikut ini

disajikan tabel jumlah penduduk usia sekolah menurut jenis kelamin di Kabupaten Serang:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Usia Sekolah Di Kabupaten Serang Tahun 2012

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
5-6	70.089	63.347	133.436
7-12	72.592	80.420	153.012
13-15	80.617	81.688	162.305
16-18	67.928	62.037	129.965
19-24	82.382	72.842	155.223
Jumlah	373.608	360.334	733.942

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011

Tahun 2011, penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, sebaliknya pada usia 16-18 dan 19-24 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada penduduk perempuan.

Angka partisipasi sekolah merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap

penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terhadap usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahkan infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Tabel 4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Di Kabupaten Serang Tahun 2011

Kelompok Umur	Angka Partisipasi Sekolah (APS)		
	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
5-6	22,2	26,6	24,7
7-12	97,4	97,3	97,4
13-15	87,6	85,0	86,3
16-18	53,8	54,7	54,2
19-24	7,9	6,4	7,1

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011

Angka partisipasi sekolah dapat juga mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Tabel di atas menunjukkan bahwa persentase atau angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia yang lain (terutama 13-15 tahun dan 16-18 tahun). Tabel di atas juga menunjukkan bahwa

partisipasi sekolah di Kabupaten Serang antara laki-laki dan perempuan tidak memperlihatkan kesenjangan yang berarti, pada usia 7-12 dan 13-15 persentase laki-laki sedikit lebih tinggi dari perempuan tapi pada usia 16-18 tahun partisipasi perempuan lebih tinggi sedikit dibandingkan laki-laki. Untuk usia 5-6 tahun yang merupakan usia belum wajib bersekolah terdapat 26,6 persen perempuan yang sudah bersekolah dan 22,2 persen laki-laki sedangkan pada usia 19-24 tahun terdapat 7,9 persen laki-laki yang masih bersekolah dan perempuan hanya 6,4 persen.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut *"The UN Guidelines Indicators for Monitoring the Millenium Development Goals"*, angka ini lebih baik daripada perbandingan jumlah absolute murid laki-laki dan perempuan. APK diperlukan karena adanya perbedaan yang

relative besar antara jumlah perempuan dan laki-laki, sehingga rasio jumlah siswa saja belum dapat menggambarkan kesetaraan dan keadilan gender.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jejang pendidikan tertentu. Angka partisipasi Kasar (APK) menggambarkan keikutsertaan penduduk pada setiap jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan. Keikutsertaan pendidikan pada proses pendidikan ini tidak terbatas pada kelompok usia normatif untuk setiap jenjang pendidikan, misalnya partisipasi untuk SD, tidak terbatas bagi

penduduk usia 7-12 tahun, namun juga melibatkan mereka yang tidak termasuk pada kelompok umur tersebut. Seperti anak berusia 6 tahun yang telah bersekolah di SD maupun mereka yang lebih dewasa namun mengikuti jenjang pendidikan yang setara dengan SD. Berikut ini disajikan Angka Partisipasi Kasar dari tingkat SD sampai SLTA.

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk

penduduk usia 7-12 tahun, SLTP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SLTA untuk penduduk usia 16-18 tahun.

Tabel 4.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Serang Tahun 2011

Jenjang Pendidikan	APK			APM		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	103,4	106,5	105,0	94,0	93,3	93,7
SLTP	87,2	79,0	83,1	73,8	65,0	69,4
SLTA	57,1	61,9	59,4	46,7	47,3	47,0

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa terdapat kesenjangan gender dalam hal APK pada seluruh jenjang pendidikan. Pada jenjang sekolah dasar APK perempuan lebih tinggi dibandingkan APK laki-laki, yaitu 106,5 persen dan 103,4 persen, begitu pula pada jenjang SLTA. APK perempuan (61,9%) lebih tinggi daripada APK laki-laki (57,1%) sedangkan pada

jenjang SLTP, APK laki-laki (87,2%) lebih tinggi daripada APK perempuan (79,0%). APK SD bernilai lebih dari 100 persen dikarenakan terdapat murid SD yang berusia di luar usia resmi SD seperti 5 atau 6 tahun atau usia di atas 12 tahun

Besarnya APM SD berdasarkan jenis kelamin memperlihatkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan, APM laki-laki 94,0 persen dan perempuan 93,3 persen. Namun untuk SLTP, APM laki-laki dan perempuan memiliki selisih yang cukup besar, yaitu 73,8 persen APM laki-laki dan perempuan hanya 65,0 persen. Sementara itu, pada jenjang SLTA APM perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan APM laki-laki.

Melihat pencapaian APK menurut jenis kelamin untuk jenjang SD menunjukkan bahwa

program wajib belajar 6 tahun telah tercapai, namun program wajib belajar 9 tahun belum tercapai, masih ada pekerjaan rumah yang harus dirampungkan. Rendahnya APK SLTP dan SLTA disebabkan oleh banyak hal, tidak hanya ketersediaan fasilitas sekolah juga akses untuk mencapai fasilitas tersebut seperti sarana angkutan dan jalan. Selain itu, faktor ekonomi juga memegang peranan penting dalam usaha masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke SLTP dan SLTA. Pada jenjang SD, masyarakat sangat merasakan sekolah tanpa biaya dan akses mudah tapi pada jenjang SLTP dan SLTA terasa bahwa biaya yang dibutuhkan sangat besar apalagi ditambah transport ke lokasi sekolah yang juga memerlukan biaya tinggi.

Menurut data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Tahun 2011 mengenai jumlah siswa SD per kecamatan

berdasarkan gender adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Murid Sekolah Dasar SD per Kecamatan Di Kabupaten Serang Tahun 2011/2012

No.	Kecamatan	Jumlah Murid		Sex rasio
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cinangka	3.513	3.195	110
2	Padaricang	4.896	4.547	108
3	Ciomas	3.159	2.912	108
4	Pabuaran	2.514	2.399	105
5	Gunungsari	1.615	1.577	102
6	Baros	3.747	3.471	108
7	Petir	3.316	3.110	107
8	Tunjungteja	2.972	2.680	111
9	Cikeusal	4.758	4.389	108
10	Pamarayan	3.730	3.515	106
11	Bandung	1.984	1.933	103
12	Jawilan	3.106	2.935	106
13	Kopo	3.052	2.860	107
14	Cikande	6.218	5.718	109
15	Kibin	2.782	2.419	115
16	Kragilan	5.252	4.849	108
17	Waringin Kurung	2.863	2.705	106
18	Mancak	3.293	2.927	113
19	Anyar	3.257	2.948	110
20	Bojonegara	2.940	2.809	105
21	Puloampel	2.214	1.967	113
22	Kramatwatu	5.388	5.073	106
23	Ciruas	5.849	5.431	108
24	Pontang	3.323	3.068	108
25	Carenang	2.675	2.591	103
26	Binuang	1.582	1.461	108
27	Tirtayasa	2.486	2.210	112
28	Tanara	2.692	2.472	109
Jumlah		93.359	86.480	108

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Pada tabel di atas tampak bahwa jumlah murid sekolah dasar berjenis kelamin laki-laki selalu lebih banyak daripada perempuan di seluruh kecamatan dengan perbandingan untuk Kabupaten Serang adalah 108 laki-laki diantara 100 perempuan. Angka-angka tersebut sedikit berbeda dengan besarnya APK yang memperlihatkan bahwa APK perempuan lebih besar dari laki-laki. APK maupun APM dihitung berdasarkan tempat tinggal tanpa memperhatikan siswa tersebut sekolah dimana, apakah di dalam Kabupaten Serang atau di luar Kabupaten Serang. Sementara itu, jumlah siswa pada tabel di atas diambil melalui registrasi sekolah artinya tidak melihat apakah siswa tinggal di Kabupaten Serang atau di luar Kabupaten Serang. Jadi masih dimungkinkan bahwa angka APK dan APM hasil penghitungan survei BPS

berbeda dengan data siswa dari Dinas Pendidikan.

Tabel 4.5 Jumlah Murid SLTP per Kecamatan Di Kabupaten Serang Tahun 2011/2012

No.	Kecamatan	Jumlah Murid		Sex rasio
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cinangka	966	945	102
2	Padaricang	1.169	926	126
3	Ciomas	557	545	102
4	Pabuaran	679	658	103
5	Gunungsari	448	449	100
6	Baros	1.272	1.245	102
7	Petir	1.211	1.119	108
8	Tunjungteja	731	752	97
9	Cikeusal	1.640	1.621	101
10	Pamarayan	1.079	988	109
11	Bandung	802	771	104
12	Jawilan	1.089	1.081	101
13	Kopo	800	666	120
14	Cikande	1.701	1.544	110
15	Kibin	893	891	100
16	Kragilan	1.926	1.898	101
17	Waringin Kurung	826	739	112
18	Mancak	671	673	100
19	Anyar	794	688	115
20	Bojonegara	1.000	819	122
21	Puloampel	117	64	183
22	Kramatwatu	1.663	1.466	113
23	Ciruas	1.637	1.645	100
24	Pontang	957	971	99
25	Carenang	990	1.062	93
26	Binuang	657	688	95
27	Tirtayasa	635	676	94
28	Tanara	471	358	132
Jumlah		27.381	25.948	106

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Pada tingkat SLTP, jumlah murid berjumlah 53.329 dengan rincian 51,34 persen laki-laki dan 48,66 persen perempuan. Pada 23 kecamatan jumlah siswa laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan sedangkan pada Kecamatan Tunjungteja, Pontang, Carenang, Binuang, dan Tirtayasa jumlah siswa laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan. Perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang cukup mencolok adalah siswa di Kecamatan Puloampel dengan sex ratio 183, artinya terdapat 183 laki-laki diantara 100 perempuan atau 18 laki-laki diantara 10 perempuan.

Tabel 4.6 Jumlah Murid SMU per Kecamatan Di Kabupaten Serang Tahun 2011/2012

No.	Kecamatan	Jumlah Murid		Sex rasio
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cinangka	511	607	84
2	Padaricang	148	132	112
3	Ciomas	211	265	80
4	Pabuaran	351	390	90
5	Gunungsari	110	138	80
6	Baros	307	320	96
7	Petir	565	843	67
8	Tunjungteja	127	115	110
9	Cikeusal	257	370	69
10	Pamarayan	320	424	75
11	Bandung	128	107	120
12	Jawilan	181	224	81
13	Kopo	306	289	106
14	Cikande	179	227	79
15	Kibin	313	597	52
16	Kragilan	131	133	98
17	Waringin Kurung	332	431	77
18	Mancak	302	221	137
19	Anyar	381	556	69
20	Bojonegara	318	422	75
21	Puloampel	18	19	95
22	Kramatwatu	446	626	71
23	Ciruas	509	748	68
24	Pontang	423	486	87
25	Carenang	348	386	90
26	Binuang	169	238	71
27	Tirtayasa	314	366	86
28	Tanara	119	96	124
Jumlah		7.824	9.776	80

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Jumlah siswa SMK laki-laki dua kali lipat dibandingkan perempuan, hal ini

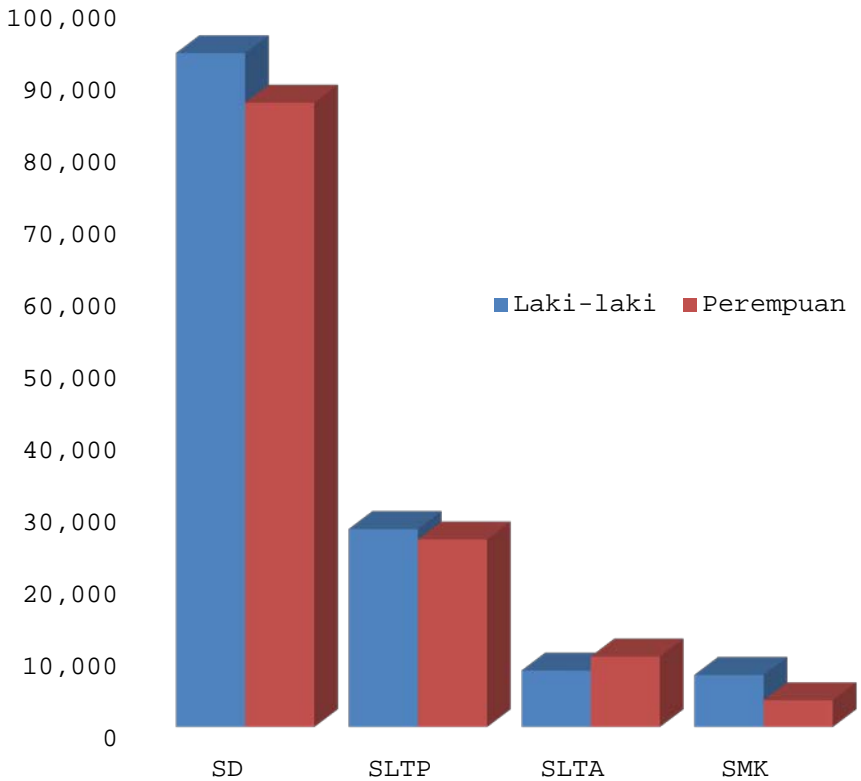
dikarenakan jurusan SMK lebih banyak jurusan teknik dibandingkan administrasi, tata busana atau tata boga. Agar terjadi perimbangan, seharusnya pemerintah mendirikan SMK-SMK yang diminati kaum perempuan tidak hanya memperbanyak SMK dengan keterampilan untuk laki-laki. Jumlah siswa laki-laki SMK sebanyak 7.220 orang dan siswa perempuan hanya 3.708 orang dengan sex ratio 195. Kecamatan Kramatawatu dan Cikande merupakan dua kecamatan yang memiliki jumlah siswa SMK terbesar.

Tabel 4.7 Jumlah Murid SMK per Kecamatan Di Kabupaten Serang Tahun 2011/2012

No.	Kecamatan	Jumlah Murid		Sex ratio
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cinangka	145	49	296
2	Padaricang	250	110	227
3	Ciomas	-	-	-
4	Pabuaran	61	71	86
5	Gunungsari	-	-	-
6	Baros	405	244	166
7	Petir	268	218	123
8	Tunjungteja	57	61	93
9	Cikeusal	199	158	126
10	Pamarayan	-	-	-
11	Bandung	-	-	-
12	Jawilan	429	425	101
13	Kopo	0	0	-
14	Cikande	963	252	382
15	Kibin	324	306	106
16	Kragilan	538	235	229
17	Waringin Kurung	-	-	-
18	Mancak	-	-	-
19	Anyar	463	310	149
20	Bojonegara	44	66	67
21	Puloampel	612	244	251
22	Kramatwatu	1.321	65	2.032
23	Ciruas	495	366	135
24	Pontang	-	-	-
25	Carenang	346	291	119
26	Binuang	48	63	76
27	Tirtayasa	117	110	106
28	Tanara	135	64	211
Jumlah		7.220	3.708	195

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Grafik 4.1 Jumlah Murid Menurut Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Serang Tahun Ajaran 2011/2012



4.2 Komposisi Guru dan Kepala Sekolah

Tabel 4.8 Jumlah Guru dan Kepala Sekolah SD Di Kabupaten Serang Tahun 2011/2012

No.	Kecamatan	Jumlah Guru		Jumlah Kepala Sekolah	
		L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Cinangka	159	211	20	16
2	Padaricang	155	211	22	16
3	Ciomas	111	146	17	11
4	Pabuaran	68	128	12	7
5	Gunungsari	51	54	6	7
6	Baros	90	160	14	11
7	Petir	129	206	17	7
8	Tunjungteja	117	131	21	2
9	Cikeusal	183	281	30	13
10	Pamarayan	104	140	15	10
11	Bandung	87	77	10	8
12	Jawilan	92	117	12	5
13	Kopo	91	115	11	9
14	Cikande	116	257	17	18
15	Kibin	74	97	17	3
16	Kragilan	138	236	18	17
17	Waringin Kurung	97	164	16	7
18	Mancak	129	139	19	9
19	Anyar	99	197	16	9
20	Bojonegara	104	142	18	4
21	Puloampel	51	121	16	3
22	Kramatwatu	85	299	18	17
23	Ciruas	182	296	24	15
24	Pontang	144	195	24	8
25	Carenang	108	98	15	6
26	Binuang	75	58	11	1
27	Tirtayasa	103	137	19	6
28	Tanara	107	123	18	3
Jumlah		3.049	4.536	467	248

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Generasi muda penerus bangsa, tentu tidak lahir begitu saja. Mereka harus dipersiapkan terlebih dahulu dengan memberikan keterampilan dan pendidikan. Oleh sebab itu kualitas pendidikan adalah hal yang mendasar dalam membentuk penerus bangsa yang berkualitas. Guru dan kepala sekolah sebagai pilar-pilar pendidikan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Perbandingan guru laki-laki dan perempuan pada jenjang pendidikan sekolah dasar terlihat perbedaan signifikan, yaitu terdapat 4.536 guru perempuan diantara 3.049 laki-laki. Semakin banyaknya guru perempuan pada jenjang sekolah dasar diakibatkan karena pekerjaan guru SD dianggap merupakan 'pekerjaan mudah' dan tidak memerlukan waktu banyak sehingga bagi kaum perempuan masih

mempunyai waktu cukup untuk mengurus rumah tangga.

Kepala sekolah merupakan tenaga guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar. Seorang kepala sekolah harus memiliki kualifikasi akademik yang baik, dan kepala sekolah merupakan guru terbaik yang dimiliki oleh suatu sekolah. Pada jenjang sekolah dasar, menurut data Dinas Pendidikan terdapat 467 (65,3%) kepala sekolah laki-laki dan 248 (34,7%) kepala sekolah perempuan. Proporsi kepala sekolah perempuan pada jenjang SD masih cukup baik, artinya terdapat 34,7 persen perempuan yang mampu memimpin suatu sekolah dasar.

Tabel 4.9 Jumlah Guru dan Kepala Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Serang Tahun 2011

Jenjang Pendidikan	Guru		Kepala Sekolah	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
TK	1	244	4	72
SD	3.049	4.536	467	248
SLTP	1.805	1.624	154	17
SMU	910	717	63	2
SMK	401	794	40	2

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Serang

Semakin tinggi jenjang pendidikan kiprah guru perempuan semakin berkurang. Pada jenjang pendidikan SMP jumlah guru perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki, yaitu 1.805 laki-laki dan 1.624 perempuan. Kalau pada jenjang SD terdapat 34,7 persen kepala sekolah perempuan, tapi pada jenjang SMP jumlah kepala perempuan jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki, hanya ada 17 kepala sekolah perempuan

diantara 154 laki-laki. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas guru perempuan untuk mampu memimpin SMP masih berada di bawah laki-laki ataukah penunjukkan kepala sekolah SMP masih bias gender, artinya masih ada keberpihakan kepada laki-laki untuk memimpin SMP.

4.3 Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf

Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan menurut MDGs adalah angka melek huruf usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator ini.

Tabel. 4.10 Angka Melek Huruf dan Angka Buta Huruf Penduduk 15 Tahun Keatas Di Kabupaten Serang Tahun 2011

Kelompok Umur (tahun)	Angka Melek Huruf (AMH)		Angka Buta Huruf	
	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15 +	97,5	93,9	2,5	6,1
15 - 49	98,8	97,3	1,2	2,7
15 - 24	99,4	99,7	0,6	0,3

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penduduk usia 15 tahun keatas persentase perempuan yang buta huruf jauh lebih besar dibandingkan laki-laki, yaitu 6,1 persen berbanding 2,5 persen. Namun, semakin dipersempit interval umur tampak bahwa kesenjangan buta huruf antara laki-laki dan perempuan semakin tidak signifikan bahkan pada penduduk usia 15-24 tahun jumlah angka buta huruf perempuan lebih kecil dibandingkan

laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran kaum perempuan terhadap pendidikan semakin baik dan tidak ada lagi perlakuan bahwa laki-laki harus diprioritaskan dibandingkan perempuan.

Perlu dilakukan analisis lebih dalam untuk mengetahui mengapa masih ada 0,6 persen laki-laki dan 0,3 persen perempuan usia 15-24 tahun serta 1,2 persen laki-laki dan 2,7 persen perempuan usia 15-49 tahun yang masih belum mampu membaca dan menulis. Oleh karena itu, perlu intervensi dari pemerintah dan masyarakat agar mereka tidak buta huruf sehingga mampu mengakses lapangan pekerjaan.

4.4 Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Sumber daya manusia yang handal dapat dilihat dari sisi pendidikan, semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan masyarakat suatu

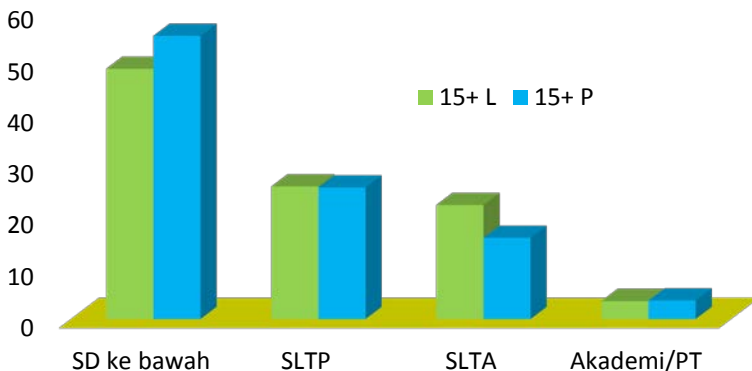
wilayah maka semakin berkualitas pembangunan di wilayah tersebut.

Tabel 4.11 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Berdasarkan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Serang Tahun 2011

Jenjang pendidikan	15+		15-49		15-24	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD ke bawah	48,6	55,0	43,4	49,7	33,3	32,9
SLTP	25,8	25,6	28,3	28,6	40,6	40,2
SLTA	22,2	15,8	24,7	17,6	25,1	24,1
Akademi/PT	3,5	3,6	3,7	4,1	1,0	2,7
Jumlah	100	100	100	100	100	100

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2011

Grafik 4.2 Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kabupaten Serang Tahun 2011



Data pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan bahwa penduduk laki-laki usia 15 tahun keatas 48,6 persen hanya berijazah SD ke bawah, 25,8 persen SLTP, 22,2 persen SLTA dan hanya 3,5 persen saja yang berijazah akademi atau perguruan tinggi. Sedangkan perempuan usia 15 tahun keatas 55 persen berijazah SD kebawah, 25,6 persen SLTP, 15,8 persen SLTA dan 3,6 persen akademi/perguruan tinggi.

Pada penduduk usia 15-49 tahun perbedaan signifikan terjadi pada jenjang SD dimana perempuan jauh lebih banyak dibanding laki-laki dan laki-laki yang menamatkan SLTA jauh lebih banyak dibanding perempuan. Yang sedikit membanggakan adalah pada penduduk usia 15-24 tahun, dimana terdapat 2,7 persen perempuan yang telah menamatkan jenjang akademi atau perguruan tinggi dan hal ini sedikit lebih

baik daripada laki-laki yang hanya 1 persen saja. Sekali lagi telah nyata menunjukkan bahwa pada kelompok usia muda (15-24 tahun) tidak ada lagi kesenjangan gender dibidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

4.5 Alasan Belum/Tidak Bersekolah (lagi)

Pemerintah telah memberi kesempatan kepada setiap anak untuk bisa bersekolah gratis, yaitu melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SD dan SMP. Namun dalam prakteknya masih ada masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pendidikan. Sebagian besar penduduk usia 7-24 tahun ataupun usia 15-24 tahun beralasan tidak bersekolah lagi karena factor ekonomi, bekerja dan menikah. 53,8 persen penduduk usia 7-24 tahun dan 54,2 persen penduduk usia 15-24 tahun tidak bersekolah lagi karena factor ekonomi. Yang menarik adalah alasan menikah banyak terjadi

pada perempuan, 11,9 persen perempuan usia 7-24 tahun beralasan tidak bersekolah lagi karena menikah/mengurus rumah tangga dan 12,5 persen perempuan usia 15-24 tahun beralasan yang sama kenapa mereka tidak meneruskan sekolah lagi.

Tabel 4.12 Persentase Penduduk 7-24 Tahun Berdasarkan Alasan Belum/Tidak Bersekolah (Lagi) di Kabupaten Serang Tahun 2011

Kelompok Umur (tahun)	7 - 24			15 - 24		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Faktor Ekonomi	51,2	56,6	53,8	51,1	57,5	54,2
Bekerja/Mencari Nafkah	22,5	18,0	20,4	23,1	18,9	21,1
Menikah/Mengurus Rumah Tangga	0,6	11,9	6,1	0,6	12,5	6,3
Merasa Pendidikan Cukup	2,1	3,0	2,5	2,2	3,1	2,6
Lainnya	23,6	10,5	17,2	23,0	8,0	15,8
Jumlah	100	100	100	100	100	100

4.6 Akses Internet

Internet mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu dan pengetahuan seseorang. Dengan mengakses internet seseorang dapat melakukan apa saja di zaman sekarang ini, sudah banyak macam bidang kehidupan yang dapat dilakukan dengan hanya mengakses internet. Budaya internet sudah mewabah di mana-mana, dengan hanya bermodalkan mesin pencari, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses yang mudah atas bermacam-macam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, internet melambangkan penyebaran (*decentralization*)/pengetahuan (*knowlwdge*) informasi dan data secara ekstrim.

Penduduk Kabupaten Serang usia 15 tahun keatas yang mengakses internet 50 persen laki-laki dan 50 persen perempuan, sedangkan untuk usia 15-49 dan 15-24 persentase laki-laki yang mengakses internet lebih banyak dibandingkan

perempuan. Akses internet ini dapat dilakukan melalui warung internet, sekolah, tempat kerja dan melalui HandPhone (HP).

Tabel 4.13 Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Yang Mengakses Internet Di Kabupaten Serang Tahun 2011

Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
15 +	50,0	50,0
15 - 49	59,1	40,9
15 - 24	59,8	40,2

BAB V ANALISIS GENDER BIDANG KESEHATAN

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat akan tercapai bila derajat kesehatan masyarakat meningkat. Hal ini dapat terjadi apabila mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dapat ditingkatkan serta kesadaran dan perilaku hidup sehat di kalangan masyarakat pun dikembangkan. Dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat maka produktifitas SDM diharapkan akan meningkat sehingga upaya pengentasan kemiskinan akan dapat lebih dipacu.

Hal ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, yaitu pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan juga antara lain untuk memperbaiki derajat kesehatan masyarakat secara efektif dan efisien, agar semua lapisan masyarakat memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan murah. Karena kesehatan menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Derajat kesehatan penduduk dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, gaya hidup, tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan dan lain-lain. Faktor budaya berkaitan dengan kebiasaan penduduk pada umumnya misal; kebiasaan mencampurkan tempat tinggal dengan tempat binatang ternak, sampah yang dibuang sembarangan, penggunaan air sungai sebagai

sumber air bersih. Sedangkan gaya hidup menyangkut perubahan perilaku yang massal akibat masuknya nilai-nilai baru yang dianggap modern seperti merokok, minum-minuman keras, makan makanan siap saji; yang sebenarnya kebiasaan tersebut merupakan gaya hidup yang kurang sehat, atau lebih mendatangkan penyakit. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyulitkan dalam mensosialisasikan kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat. Tingkat ekonomi yang rendah menghambat masyarakat atas akses terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan, dan juga rendahnya tingkat pemenuhan gizi yang diperlukan tubuh.

5.1 Angka Penolong Persalinan

Kesehatan bayi tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu, namun juga dipengaruhi oleh factor-faktor lain, diantaranya adalah proses kelahiran/persalinan. Data penolong

kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum.

Tabel di bawah ini menunjukkan persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan pada saat kelahiran.

Tabel 5.1 Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Di Kabupaten Serang Tahun 2011

Umur Balita	Laki-laki		Perempuan	
	Tenaga Medis	Dukun Bayi/lainnya	Tenaga Medis	Dukun Bayi/lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	59,5	40,5	59,5	40,5
1	56,8	43,2	37,8	62,2
2	48,3	51,7	52,5	47,5
3	47,4	52,6	53,9	46,1
4	55,3	44,7	47,3	52,7
Total	53,7	46,3	50,0	50,0

Sumber: Susenas 2011

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2011 di Kabupaten Serang masih banyak ditemui bayi yang ditolong persalinannya bukan oleh tenaga medis. Balita yang berjenis

kelamin laki-laki 53,7 persen kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan, sedangkan balita perempuan hanya 50 persen saja yang ditolong oleh tenaga kesehatan. Kecenderungan untuk melakukan persalinan oleh tenaga medis semakin baik dari waktu ke waktu, tampak pada tabel bayi yang berusia 0 tahun (di bawah 1 tahun) terdapat 59,5 persen yang kelahirannya ditolong oleh tenaga kesehatan dan bayi perempuan 59,5 persen juga. Hal itu menunjukkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga kesehatan yang berkualitas.

5.2 Kesehatan Ibu

Salah satu tujuan Millenium Developments Goals (MDG's) adalah menurunkan angka kematian ibu sebesar tiga perempatnya antara 1990 dan

2015. Kematian ibu merupakan kumulatif dari kematian ibu hamil, ibu melahirkan maupun ibu nifas. Oleh karena itu, usaha preventif terhadap ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas harus selalu digalakkan agar mengurangi resiko kematian ibu.

Menurut catatan Dinas Kesehatan Kabupaten Serang terdapat 111,3 ibu meninggal diantara 100.000 kelahiran hidup. Faktor utama kematian ibu adalah penolong persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga medis, pelayanan ibu nifas dan beberapa usaha pencegahan baik kunjungan ibu hamil ke tenaga kesehatan maupun imunisasi kurang maksimal.

Berikut beberapa data capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang terkait usaha-usaha dalam mengurangi resiko kematian ibu:

Tabel 5.2 Beberapa Indikator Kesehatan Ibu di Kabupaten Serang Tahun 2011

Indikator Ibu	Frekuensi
(1)	(2)
Angka Kematian Ibu (Dilaporkan) (per kelahiran hidup) 100.000	111,3
Kunjungan Ibu Hamil (K1)	101%
Kunjungan Ibu Hamil (K4)	61,7%
Persalinan ditolong Tenaga Kesehatan	80,20%
Pelayanan Ibu Nifas	84,27%
Ibu Hamil dengan imunisasi TT2+	85,56%
Ibu Hamil mendapat Tablet Fe3	70,59%

Sumber: Profil Kesehatan 2012

5.3 Imunisasi

Imunisasi adalah pemberian kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit dengan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang sedang mewabah atau berbahaya bagi seseorang. Imunisasi

berasal dari kata imun yang berarti kebal atau resisten. Imunisasi terhadap suatu penyakit hanya akan memberikan kekebalan atau resistensi pada penyakit itu saja, sehingga untuk terhindar dari penyakit lain diperlukan imunisasi lainnya.

Imunisasi biasanya lebih fokus diberikan kepada anak-anak karena sistem kekebalan tubuh mereka masih belum sebaik orang dewasa, sehingga rentan terhadap serangan penyakit berbahaya. Imunisasi tidak cukup hanya dilakukan satu kali, tetapi harus dilakukan secara bertahap dan lengkap terhadap berbagai penyakit yang sangat membahayakan kesehatan dan hidup anak.

Vaksin BCG tidak dapat mencegah seseorang terhindar dari infeksi *M. tuberculosis* 100%, tapi dapat mencegah penyebaran penyakit lebih

lanjut, Berasal dari bakteri hidup yang dilemahkan (Pasteur Paris 1173 P2), Diberikan sebelum usia 2 bulan.

Imunisasi Campak diberikan untuk mencegah seseorang terhindar dari penyakit campak, biasa diberikan kepada bayi yang berusia 9 bulan

Persentase balita laki-laki yang telah mendapatkan Imunisasi BCG sebesar 85,9 persen dan persentase balita perempuan hanya 80,1 persen. Target yang harus dicapai adalah 100 persen artinya masih banyak masyarakat yang belum tahu dan sadar akan pentingnya imunisasi BCG. Sementara itu, balita laki-laki yang memperoleh imunisasi campak mencapai 77,7 persen dan balita perempuan 75,8 persen.

Tabel 5.3 Persentase Balita Yang Mendapatkan Imunisasi BCG dan Campak di Kabupaten Serang Tahun 2011

Umur Balita	Laki-laki		Perempuan	
	BCG	Campak	BCG	Campak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	93,7	65,1	70,8	69,7
2	86,8	82,3	82,2	82,2
3	80,4	77,6	86,7	75,0
4	82,2	83,1	80,1	73,8
Total	85,9	77,7	80,1	75,8

Sumber : Susenas 2011

Imunisasi yang mampu mencegah seseorang terhadap penyakit Dipteri, Partusis dan Tetanus adalah imunisasi DPT. Imunisasi ini termasuk imunisasi yang kurang dikenal oleh masyarakat apalagi frekuensi imunisasi yang dilakukan sebanyak tiga kali pada umur-umur tertentu seorang bayi. Artinya kepatuhan terhadap jadwal suntik DPT dapat menyebabkan imunisasi DPT berkualitas tapi apabila jadwal suntik DPT tidak pada waktunya maka kualitas

imunisasi akan berkurang. Imunisasi DPT seharusnya sudah lengkap diberikan kepada bayi berumur 4 bulan.

Tabel 5.4 Persentase Balita Yang Mendapatkan Imunisasi DPT di Kabupaten Serang Tahun 2011

Umur Balita (tahun)	Laki-laki				Perempuan			
	Tidak pernah	1	2	3	Tidak pernah	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	14,4	51,5	9,4	24,7	25,2	46,2	12,3	16,4
2	13,2	37,7	20,0	29,2	11,5	43,6	8,2	36,7
3	16,0	53,0	10,1	20,9	11,7	35,7	21,4	31,2
4	17,8	38,3	14,3	29,5	17,2	21,8	23,7	37,3
Total	15,2	43,9	14,2	26,7	16,0	36,9	15,9	31,2

Sumber : Susenas 2011

Balita laki-laki, masih terdapat 15,2 persen yang belum pernah sama sekali disuntik DPT, hanya 43,9 persen yang baru disuntik sekali, 14,2 persen disuntik 2 kali dan 26,7 persen telah mendapatkan imunisasi lengkap. Sementara itu, balita perempuan yang tidak

pernah sama sekali mendapatkan imunisasi DPT ada 16 persen, 36,9 persen hanya disuntik sekali, 15,9 persen disuntik 2 kali dan 31,2 persen disuntik imunisasi DPT lengkap.

Tabel 5.5 Persentase Balita Yang Mendapatkan Imunisasi Polio di Kabupaten Serang Tahun 2011

Umur Balita	Laki-laki				Perempuan			
	Tidak pernah	1	2	≥ 3	Tidak pernah	1	2	≥ 3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	13,8	43,2	11,7	31,3	21,4	36,3	12,9	29,4
2	9,5	16,4	29,2	44,9	7,0	30,7	21,6	40,7
3	20,0	29,1	16,8	34,2	4,7	35,1	19,5	40,7
4	16,9	31,8	16,1	35,2	11,9	34,7	16,8	36,6
Total	14,5	29,0	19,4	37,2	10,9	33,9	18,0	37,2

Sumber : Susenas 2011

Imunisasi yang selalu gencar dilakukan oleh pemerintah adalah gerakan pecan imunisasi polio dengan harapan bahwa pada tahun tertentu Indonesia akan terbebas dari penyakit polio. Gerakan yang gencar dan tidak henti-hentinya

belum mampu membebaskan masyarakat dari penyakit polio. pada tabel tampak bahwa masih terdapat 14,5 persen balita laki-laki dan 10,9 persen balita perempuan yang memang belum sekalipun mendapatkan imunisasi polio.

Masih belum tercapainya target 100 persen balita mendapat imunisasi dasar disebabkan karena banyak factor, pertama, ketidaktahuan dan kesadaran masyarakat tentang imunisasi yang masih kurang, lalu akses ke sarana kesehatan masih kurang, banyak warga enggan ke sarana/tenaga kesehatan karena jaraknya cukup jauh dan ketiadaan transport juga menyebabkan mereka enggan ke sarana/tenaga kesehatan.

5.4 Pemberian ASI

Penyebab kekurangan gizi pada balita umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu sebab

langsung (melalui makanan dan penyakit Infeksi), dan sebab tak langsung (kesulitan ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pangan, kurang baiknya pelayanan kesehatan dan rendahnya sanitasi lingkungan). Berkaitan dengan hal tersebut, berikut akan ditampilkan data mengenai lamanya pemberian ASI dan ASI eksklusif bagi bayi atau balita.

Air Susu Ibu (ASI) mengandung makanan terbaik bagi bayi. Di dalam ASI terkandung semua zat gizi yang diperlukan untuk membangun dan menyediakan energy bagi tubuh bayi. Beberapa keuntungan ASI bagi bayi adalah sebagai antibody untuk melindungi bayi dari infeksi, dapat memupuk ikatan emosional antara ibu dan anak, nutrisi ASI mudah dicerna oleh system pencernaan bayi yang belum matang, mengurangi resiko alergi di kemudian hari, murah (tanpa biaya), dan lain-lain.

Tabel 5.6 Persentase Balita Berdasarkan Lamanya Pemberian ASI di Kabupaten Serang Tahun 2011

Umur Balita	Laki-laki			Perempuan		
	<13	13-24	>24	<13	13-24	>24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	32,0	55,7	12,3	21,4	36,3	12,9
3	34,3	65,7	0,0	7,0	30,7	21,6
4	14,8	71,6	13,6	4,7	35,1	19,5
Total	26,7	63,7	9,7	10,9	33,9	18,0

Sumber: Susenas 2011

ASI sangat penting bagi perkembangan dan kesehatan balita. ASI merupakan zat yang sempurna untuk pertumbuhan bayi dan mempercepat perkembangan berat badan. Lamanya balita disusui tidak langsung berpengaruh pada factor kesehatan.

Pada tahun 2011, di Kabupaten Serang terdapat 26,7 persen balita laki-laki yang lamanya diberikan ASI hanya satu tahun saja,

63,7 persen selama 13-24 bulan dan 9,7 persen diberikan ASI selama lebih dari dua tahun.

ASI Eksklusif adalah salah satu cara yang dilakukan oleh seorang ibu untuk memberikan ASI tanpa minuman dan makanan tambahan lain atau bahkan air putih kepada bayi hingga ia berumur 0-6 bulan. ASI Eksklusif dapat bermanfaat untuk bayi dan sang ibu. Untuk bayi, ASI eksklusif dapat bermanfaat untuk melindungi bayi dari kasus infeksi. Selain itu, ASI eksklusif juga baik untuk ibu karena dapat menambah panjang kembalinya kesuburan setelah ia melahirkan sehingga ia dapat mengatur jarak anak dan baik untuk menunda kehamilan berikutnya.

Tabel 5.7: Persentase Balita Berdasarkan Pemberian ASI Eksklusif Di Kabupaten Serang Tahun 2011

Umur Balita	Laki-laki		Perempuan	
	ASI Eksklusif	Tidak ASI Eksklusif	ASI Eksklusif	Tidak ASI Eksklusif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	30,8	69,2	20,6	79,4
1	16,3	83,7	13,2	86,8
2	21,1	78,9	27,9	72,1
3	24,4	75,6	14,6	85,4
4	32,1	67,9	32,9	67,1
Total	24,6	75,4	22,9	77,1

Sumber: Susenas 2011

Di Kabupaten Serang, persentase balita dengan ASI eksklusif cukup rendah, pada tabel di atas terlihat bahwa hanya 24,6 persen balita laki-laki yang mendapat ASI eksklusif dari ibunya dan balita perempuan hanya 22,9 persen saja. Cakupan pemberian air susu ibu eksklusif bagi bayi hingga usia enam bulan

yang masih rendah dikarenakan masih kurangnya kesadaran ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi bayinya serta kurangnya pemahaman ibu mengenai pentingnya ASI eksklusif. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman ibu mengenai pentingnya ASI eksklusif, antara lain melalui sosialisasi dan pencanangan sadar gizi.

5.5 Tingkat Kesakitan

Upaya meningkatkan kesehatan kesehatan dapat dapat diidentikkan dengan upaya penurunan resiko sakit dan peningkatan status gizi. Penduduk yang sehat memberikan sumbangan positif terhadap laju pembangunan.

Tabel 5.8 Persentase penduduk yang mengalami keluhan penyakit di Kabupaten Serang Tahun 2011

Jenis penyakit/keluhan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Panas	10,7	9,8
Batuk	12,8	12,2
Pilek	13,4	12,6
Asma	1,3	1,4
Diare	1,1	1,5
Sakit kepala berulang	4,7	6,1
Sakit gigi	1,4	1,8
Lainnya	14,7	17,3
Kunjungan pasien ke Puskesmas	269.411	385.910

Sumber: Susenas 2011

Tingkat kesakitan hampir di seluruh penyakit tidak berbeda antara laki-laki dan perempuan. Penyakit yang paling banyak diderita adalah penyakit panas, batuk dan pilek. Terdapat 14,7 persen laki-laki dan 17,3 persen perempuan yang menderita penyakit selain panas, batuk, pilek, asma, diare, sakit kepala berulang, dan sakit gigi. Dari seluruh

penderita penyakit di Kabupaten Serang sebanyak 269.411 laki-laki yang mengobati diri datang ke puskesmas dan perempuan 385.910 orang.

5.6 Tenaga Kesehatan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2001 yang disebut sebagai tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Kesetaraan gender dalam bidang kesehatan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki akses dan control yang setara, keputusan atas diri sendiri yang setara, kesempatan yang setara dalam hal partisipasi dan kesempatan yang

setara untuk memperoleh manfaat di bidang kesehatan.

Tabel 5.9 Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Serang Tahun 2011

Tenaga Kesehatan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)
Dokter Umum	19	7
Dokter Gigi	26	56
Bidan	4	24
Perawat	-	525
Perawat Gigi	197	432
Tenaga Farmasi	3	16
Tenaga Gizi	7	25
Tenaga Kesmas	6	15
Tenaga Sanitasi	37	34
Tenaga Teknisi Medis	14	9
Fisioterapis		8
Jumlah (tanpa fisioterapis)	322	1161

Sumber: Profil Kesehatan 2012

Jumlah tenaga kesehatan perempuan berjenis kelamin perempuan memang jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, perbedaan yang mencolok adalah tenaga perawat dan juga

perawat gigi. Total tenaga kesehatan yang bertugas di sarana dan prasarana kesehatan yang terdapat di Kabupaten Serang berjumlah 1.483 orang dan 1.161 orang diantaranya adalah perempuan.

BAB VI

ANALISIS GENDER BIDANG KETENAGAKERJAAN

6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Serang dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator tersebut merupakan gambaran kegiatan penduduk usia kerja berdasarkan kegiatannya dalam ketenagakerjaan yang dikelompokkan menjadi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.

TPAK adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja mencakup mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap penduduk usia kerja. Tahun 2011, TPAK Kabupaten Serang sebesar 64,74 persen dengan

rincian laki-laki 83,67 persen dan perempuan hanya 45,48 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2011 mencapai 13,29 persen dimana TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 18,34 persen perempuan dan 10,60 persen laki-laki.

Tabel 6.1 Indikator Ketenagakerjaan di Kabupaten Serang Tahun 2011

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	428.662	229.017	657.679
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	83,67	45,48	64,74
Tingkat Pengangguran terbuka (TPT)	10,60	18,34	13,29
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	89,40	81,66	86,71

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2011

6.2 Penduduk yang Bekerja

Definisi umum yang dikenal dewasa ini tentang kegiatan bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan bekerja termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Bekerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pada sisi lain bekerja bagi seseorang merupakan wahana menempatkan dirinya mendapat pengakuan dalam kehidupan sosial yang lebih luas di tengah lingkungannya. Tidak jarang mereka yang tidak memiliki pekerjaan, dalam interaksi kehidupannya merasa sebagai

sosok manusia yang tidak dapat memberikan manfaat nyata bahkan sebagai beban, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun negara. Karena itu, bekerja (khususnya bagi orang dewasa) adalah kenyataan hidup yang harus ditempuhnya. Terlebih bagi yang memang dirinya memiliki tanggung jawab/beban keluarga, bekerja telah menjadi sandaran utama dalam menapaki kelangsungan hidup. Namun demikian, pada faktanya tidak setiap orang dapat memperoleh pekerjaan sehingga harus menganggur atau memang dirinya tidak mampu bekerja karena usia lanjut, cacat atau sebab lainnya.

Untuk melihat kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah perlu dilihat karakteristik ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Karakteristik tersebut berupa indikator ketenagakerjaan antara lain Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Jumlah penduduk yang bekerja atau aktif secara ekonomi pada tahun 2011 sekitar 570.246 orang atau 56,1 persen dari total penduduk usia kerja (PUK). Penyebaran penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin memberikan indikasi bahwa persentase laki-laki dua kali lipat dibanding perempuan. Besarnya persentase penduduk laki-laki dan perempuan yang bekerja masing-masing 67,2 persen dan 32,8 persen.

Bila dibedakan menurut golongan umur, penduduk yang bekerja pada umumnya berumur 25-54 tahun yang merupakan usia prima (*prime age*). Sebanyak 62,6 persen dari total penduduk yang bekerja merupakan penduduk usia prima, sedangkan penduduk usia muda yang masih merupakan usia sekolah (15-24 tahun) tetapi terpaksa bekerja terdapat 26,7 persen.

Proporsi penduduk perempuan yang bekerja pada usia 55 tahun ke atas sedikit lebih besar dibanding proporsi penduduk laki-laki, masing-masing sebesar 9,5 persen dan 8,9 persen. Perempuan usia muda (15-24 tahun) yang bekerja sekitar 20,3 persen dan lebih banyak dibanding laki-laki yang besarnya 15,5 persen.

Tabel 6.2 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Serang Tahun 2010-2011

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(4)	(5)	(6)
15 - 24	15,5	20,3	26,7
25 - 54	75,6	70,2	62,6
55 +	8,9	9,5	10,8
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: Sakernas 2011

6.3 Lapangan Pekerjaan/Usaha

Dilihat dari lapangan usaha/pekerjaan sampai dengan saat ini, Kabupaten Serang masih merupakan daerah agraris, ditandai besarnya sumbangan sektor pertanian dalam menyerapan tenaga kerjanya walaupun terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) jauh lebih rendah dibanding sektor industri pengolahan. Nilai tambah PDRB pada tahun 2011 berasal dari sektor industri mampu menyumbang sebesar 61,41 persen padahal hanya menyerap tenaga kerja sekitar 20,9 persen lebih rendah dibanding sektor pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja 24,9persen tetapi hanya menyumbang terhadap pembentukan PDRB sebesar 14,44 persen.

Dengan memperhatikan struktur lapangan usaha sampai tahun 2011 dan nilai produksi

masih-masing sektor usaha terhadap pembentukan PDRB, Banten kini tengah mengalami transisi struktur ketenagakerjaan yang semula lebih menjadikan sektor pertanian sebagai andalan perlahan tapi pasti bergerak menuju sektor-sektor usaha 'modern' seperti industri, perdagangan dan jasa-jasa. Indikasi ini jelas terlihat dimana gabungan ketiga sektor tersebut mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Selain sektor industri pengolahan, maka sektor perdagangan dengan daya serap tenaga kerja sebesar 23,8 persen dan jasa-jasa 15,5 persen paling tidak akan mampu memacu pergeseran struktur tenaga kerja.

Sektor pertanian dimasa depan tentu saja akan tetap dijadikan andalan terlebih dalam kondisi perekonomian yang masih carut marut setelah terhempas krisis moneter dan ekonomi. Fakta ini jelas, karena bagaimanapun sektor

pertanian akan tetap menjadi penyerap tenaga kerja yang besar walaupun pada kenyataannya bekerja di sektor ini umumnya mendapatkan tingkat upah lebih rendah dibanding sektor lainnya. Selain itu, paling tidak sektor ini menjadi wadah penampungan mayoritas tenaga kerja berpendidikan rendah yang sebagiannya kalah dalam pertarungan merebut lapangan kerja selainnya yang cenderung lebih melirik pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Walhasil sektor pertanian lebih banyak digerakan oleh faktor produksi seperti SDM yang kurang berkualitas dengan teknologi tradisional utamanya mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Namun demikian, sektor pertanian akan tetap dijadikan pendukung dan pensuplai bahan baku bagi perkembangan sektor lainnya (seperti industri dan perdagangan) terlebih

dengan kemampuan mengembangkan agribisnis secara modern.

Tabel 6.3 Distribusi Tenaga Kerja menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama dan Jenis kelamin di Kabupaten Serang, Tahun 2011

Lapangan Pekerjaan	L	P	L+P
(1)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	26,0	22,7	24,9
Industri	19,9	23,1	20,9
Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	20,4	30,8	23,8
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	12,5	21,7	15,5
Lainnya	21,3	1,6	14,8
Total	100	100	100

Sumber : Sakernas 2011

Tenaga kerja perempuan sebagian besar terkonsentrasi pada sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi mencapai 30,8 persen, lebih tinggi dibanding laki-laki yang hanya

sebesar 20,4 persen. Selain itu, persentase tenaga kerja perempuan yang lebih besar dari laki-laki juga terdapat pada sektor industri dan jasa kemasyarakatan, sosial dan perumahan.

Persebaran jumlah tenaga kerja di Kabupaten Serang terkonsentrasi pada sector industry, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang bahwa pada akhir tahun 2011 perusahaan sector industry pengolahan yang berjumlah 257 perusahaan menyerap tenaga kerja sebanyak 122.827 orang dengan rincian laki-laki 51.281 orang dan perempuan 70.908 orang. Beberapa perusahaan sepatu menyerap jumlah tenaga kerja wanita cukup besar, salah satu perusahaan sepatu terbesar mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 52.521 orang dan 44.392 diantaranya adalah perempuan.

Jumlah perusahaan seluruhnya yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang sebanyak 447 perusahaan dengan tenaga kerja laki-laki sebanyak 63.794 WNI dan 550 WNA sedangkan tenaga kerja perempuan 72.774 WNI dan 105 WNA. Tenaga kerja yang terserap tersebut tidak semua tinggal dan menetap di wilayah Kabupaten Serang tetapi sebagian tinggal di sekitarnya seperti Kota Serang, Kota Cilegon, Pandeglang, Lebak dan Tangerang.

Tabel 6.4 Distribusi Tenaga Kerja menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama dan Jenis kelamin di Kabupaten Serang, Tahun 2011

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	4300	42	4342
Pertambangan dan Penggalian	694	293	987
Industri Pengolahan	51.813	71.013	122.827
Listrik, Gas dan Air	422	27	449
Bangunan	578	166	744
Perdagangan Besar, Eceran dan Rumah Makan serta Hotel	3.704	668	4.372
Angkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi	495	50	545
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.349	200	1.549
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	988	420	1.408
Jumlah	64.344	72.879	137.223

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Serang

Tabel 6.5 Distribusi Tenaga Kerja menurut Sektor Utama dan Jenis kelamin di Kabupaten Serang, Tahun 2011

Kelompok Sektor	L	P	L+P
(1)	(4)	(5)	(6)
Primer	26,5	22,7	25,2
Sekunder	48,2	54,5	50,3
Tersier	25,3	22,8	24,5
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber : Sakernas 2011

Sektor paling dominan yang menjadi sumber pendapatan adalah kelompok sector sekunder dengan persentase perempuan di sector ini mencapai 54,5 persen sedangkan laki-laki hanya 48,2 persen. Kelompok sector sekunder ini terdiri dari lapangan usaha industri; listrik, gas dan air; konstruksi; dan perdagangan, rumah makan dan akomodasi. Sementara itu kelompok sector primer adalah

pertanian dan pertambangan/penggalian, selain itu adalah kelompok sector tersier.

6.4 Status Pekerjaan

Tabel 6.6 Distribusi Tenaga Kerja menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis kelamin di Kabupaten Serang, Tahun 2011

Status Pekerjaan Utama	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Pengusaha	43,9	37,4	41,7
Buruh/pegawai/karyawan	38,0	37,5	37,8
Pekerja bebas	14,2	4,9	11,2
Pekerja keluarga	3,9	20,3	9,3
Jumlah	100	100	100

Sumber: Sakernas 2011

Perempuan yang bekerja sebagai pengusaha sebanyak 37,4 persen, buruh/pegawai 37,8 persen, pekerja bebas 4,9 persen dan 20,3 persen lainnya sebagai pekerja keluarga atau

pekerja tak dibayar. Laki-laki dominan menjadi pengusaha 43,9 persen, lalu buruh/pegawai 38 persen, pekerja bebas 14,2 persen dan pekerja keluarga hanya 3,9 persen. Perempuan memang memiliki kecenderungan untuk menjadi pekerja keluarga yang sifatnya hanya membantu pekerjaan suami atau laki-laki atau anggota rumah tangga lainnya.

Tenaga kerja sector informal masih cukup banyak dilakukan oleh penduduk Kabupaten Serang. Pekerja sector informal biasanya memiliki penghasilan yang tidak tetap dan tempat pekerjaan yang tidak terdapat kenyamanan kerja. Ciri-ciri sector informal adalah mudah masuk, artinya setiap orang dapat kapan saja masuk ke jenis usaha informal ini, bersandar pada sumber daya local, biasanya usaha milik keluarga, operasi skala kecil, padat karya, keterampilan diperoleh dari luar

system formal sekolah dan tidak diatur pasar yang kompetitif.

Tabel 6.7 Persentase Tenaga Kerja Formal dan Informal di Kabupaten Serang Tahun 2011

Status Pekerjaan Utama	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
Formal	58,7	62,3	59,9
Informal	41,3	37,7	40,1
Jumlah	100,0	100,0	100,0

Sumber: Sakernas 2011

Perempuan yang bekerja di sector formal sebesar 62,3 persen penduduk dari seluruh perempuan yang bekerja sedangkan pekerja informal 37,7 persen. Persentase laki-laki yang bekerja di sector informal lebih sedikit dibandingkan perempuan.

6.5 Tenaga Kerja Indonesia

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri (seperti Malaysia, Timur Tengah, Taiwan, Australia dan Amerika Serikat) dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. TKI perempuan sering disebut sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW).

Pada tahun 2011, warga Kabupaten Serang yang bekerja di luar negeri sebagai TKI sebanyak 18.383 orang, di mana jumlah TKW cukup mendominasi yaitu 16.692 orang sedangkan laki-laki hanya 1.691 orang saja. Kecamatan yang memiliki jumlah TKI paling banyak adalah Kecamatan Pontang, Tirtayasa dan Ciruas. Berikut tabel lengkap jumlah TKI berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin:

Tabel 6.8 Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Serang Tahun 2011

No.	Kecamatan	Jumlah TKI		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Cinangka	100	1.312	1.412
2	Padaricang	62	594	656
3	Ciomas	9	39	48
4	Pabuaran	41	76	117
5	Gunungsari	6	178	184
6	Baros	34	40	74
7	Petir	12	53	65
8	Tunjungteja	13	29	42
9	Cikeusal	14	81	95
10	Pamarayan	2	29	31
11	Bandung	6	64	70
12	Jawilan	13	51	64
13	Kopo	27	54	81
14	Cikande	32	126	158
15	Kibin	17	59	76
16	Kragilan	37	933	970
17	Waringin Kurung	9	71	80
18	Mancak	19	97	116
19	Anyar	25	102	127
20	Bojonegara	13	94	107
21	Puloampel	35	479	514
22	Kramatwatu	84	100	184
23	Ciruas	91	2.263	2.354
24	Pontang	463	4.011	4.474
25	Carenang	111	1.173	1.284
26	Binuang	12	60	72
27	Tirtayasa	215	3.148	3.363
28	Tanara	189	1.376	1.565
Jumlah		1.691	16.692	18.383

Sumber : Pendataan Potensi Desa 2011

Faktor yang menyebabkan mereka menjadi TKI adalah faktor ekonomi dimana ekonomi di perdesaan tempat tinggal mereka tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan penghasilan yang cukup memadai sehingga tidak ada pilihan lain selain menjadi TKI.

BAB VII
ANALISIS GENDER BIDANG POLITIK, PEMERINTAHAN
DAN KEAMANAN

Kondisi politik dan keamanan di suatu wilayah dapat ditunjukkan dengan baik oleh tingkat kerawanan dan potensi konflik di wilayah yang bersangkutan. Perkembangan kondisi politik khususnya sejak reformasi sangat pesat perkembangannya, dan berdampak pada ketahanan sosial kaitannya dengan potensi konflik yang ditimbulkan. Kondisi keamanan juga mengalami pergeseran kualitas maupun kuantitas,

Tuntutan persamaan hak wanita tentunya didasarkan pada beberapa anggapan bahwa antara wanita dan laki-laki tidak banyak terdapat perbedaan, sebagaimana dikemukakan Presiden Pertama Indonesia, Sukarno (1963:30) bahwa:

...ini tidak menjadi bukti bahwa dus kualitas otak perempuan itu kurang dari kualitas otak kaum laki-laki, atau ketajaman otak laki-laki. Kualitasnya sama, ketajamannya sama hanya kesempatan bekerjanya yang tidak sama, kesempatan berkembangnya yang tidak sama. Maka oleh karena itu, justru dengan alasan kurang dikasihnya kesempatan oleh masyarakat sekarang pada kaum perempuan, maka kita wajib berikhtiar membongkar ketidakadilan masyarakat terhadap kaum perempuan itu!

Jelas sekali pendapat di atas bahwa kaum wanita memiliki kedudukan yang sama dalam berusaha dan bekerja, hanya saja budaya masyarakat yang menganggap wanita harus berada di rumah mengurus rumah tangga. Tetapi dengan adanya kemajuan jaman maka wanita dan laki-laki dapat bekerja sama dalam berbagai

kehidupan. Dengan kata lain, bahwa wanita perlu mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengisi pembangunan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

7.1 Politik

Perkembangan politik dewasa ini semakin cepat melebihi perkembangan ekonomi maupun perkembangan penduduk. Disadari bahwa sejak bergulirnya proses reformasi, kondisi perpolitikan di tanah air mengalami revolusi baik dari sisi ideologi, organisasi politik maupun proses demokrasi.

Kesejajaran wanita dengan laki-laki sebagai suatu usaha yang tidak sia-sia apabila wanita itu sendiri berusaha sesuai dengan kemampuannya, sehingga dengan kemampuan yang sama maka akan sanggup bersaing di kehidupan ini dengan kaum laki-laki sesuai dengan sifat

kewanitaannya. Persamaan hak yang dimiliki oleh kaum wanita Indonesia termasuk kepemimpinan dan partisipasi dalam bidang politik. Walaupun wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki bukan berarti yang bersangkutan harus meninggalkan tugas-tugas kewanitaannya sebagai seorang ibu.

Partisipasi wanita dalam bidang politik, walaupun masih kurang, nampaknya wanita telah berusaha ke arah yang lebih baik dengan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap partai peserta pemilu yang dimulai tahun 2004 untuk memasukkan anggota legislative yang terpilih sebanyak 30%, begitu pula di badan legislative seperti halnya DPR/DPRD Tk I dan Tk II anggotanya minimal 30% harus wanita.

Tabel 7.1 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Serang Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin Tahun 2011

Fraksi	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golkar	9	1	10
PDI Perjuangan	4	0	4
Parta Persatuan Pembangunan	4	0	4
Partai Keadilan Sejahtera	5	0	5
Partai Madani	6	0	6
Partai Demokrat	5	3	8
Partai Hanura	3	1	4
Partai Gerindra	4	0	4
Partai PAN	5	0	5
Jumlah	45	5	50

Sumber: DPRD Kabupaten Serang

Keterwakilan wanita dalam DPRD Kabupaten Serang Tahun 2011 belum sesuai dengan peraturan yang mengharuskan target minimal 30% wanita di dalam parlemen. Hasil Pemilu tahun 2009 menunjukkan bahwa hanya 10 persen saja wanita yang terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Serang dan 90 persennya adalah laki-laki. Apabila dirinci per fraksi atau partai

terlihat sekali bahwa banyak partai yang tidak diwakili oleh satupun wanita, artinya wanita masih dinomorduakan dalam dunia politik di Kabupaten Serang. Akibat dari itu, tentu saja aspirasi pembangunan yang berhubungan dengan wanita akan kurang mendapat respon dari anggota DPRD sehingga pembangunan yang responsive gender akan kurang maksimal.

7.2 Pemerintahan

Keberhasilan suatu pemerintahan baik sebagai keseluruhan maupun berbagai kelompok dalam pemerintahan daerah, sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan yang terdapat dalam pemerintahan yang bersangkutan. Persoalan gender akhir-akhir ini sedang menjadi wacana public yang hangat dibicarakan oleh banyak kalangan. Proporsi perempuan dan laki-laki dalam kepemimpinan di daerah sering terdapat

kesenjangan, seperti sedikitnya jumlah wanita yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam instansi pemerintah daerah.

Berikut disajikan tabel jumlah pemimpin dalam organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Serang:

Tabel 7.2 Jumlah Pegawai Menurut Eselon Di Pemerintahan Kabupaten Serang Tahun 2011

Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Eselon II	30	3	33
Eselon III	165	27	192
Eselon IV	566	211	777
Jumlah	761	241	1.002

Sumber: BKD Kabupaten Serang

Pada tabel di atas tampak bahwa terjadi kesenjangan jumlah pejabat antara laki-laki dan perempuan. Pejabat eselon II atau kepala dinas/badan yang berjenis kelamin perempuan

hanya 3 orang saja dari 33 orang pejabat atau hanya 9,1 persen saja. Proporsi perempuan semakin meningkat seiring dengan semakin rendahnya jabatan, pejabat eselon III perempuan ada 14,6 persen sedangkan pejabat eselon IV proporsi perempuan semakin besar, yaitu 27,2 persen.

Rendahnya proporsi wanita dalam jabatan disebabkan oleh banyak hal, seperti kebijakan yang tidak responsive gender, kurangnya potensi wanita dibandingkan laki-laki atau kesempatan yang memang belum ada.

Tabel 7.3 Jumlah Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Tahun 2011

Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
D4/S1	5.454	2.744	8.198
S2	201	61	262
Jumlah	5.655	2.805	8.460

Sumber : BKD Kabupaten Serang

Kalau dilihat dari potensi terutama sisi pendidikan, terdapat 2.744 pegawai wanita yang berpendidikan D4/S1 (33,5%) dan 61 pegawai wanita berpendidikan S2 (23,3%), artinya persentase wanita berpendidikan tinggi sudah cukup baik dan proporsi pejabat wanita sudah cukup besar sejalan dengan proporsi pendidikan pegawai wanita.

Tabel 7.4 Jumlah Pejabat Daerah di Kabupaten Serang Tahun 2011

Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Bupati/Wakil Bupati	1	1	2
Camat	27	1	28
Kepala Desa	310	4	314
Sekretaris Desa	307	7	314

Kabupaten Serang dipimpin oleh seorang Bupati berjenis kelamin laki-laki dan wakilnya adalah seorang perempuan. Dari 28 kecamatan hanya terdapat seorang camat perempuan dan diantara 314 desa hanya terdapat 4 kepala desa perempuan dan 7 sekretaris desa (sekdes) saja. Data tersebut menunjukkan ketimpangan gender yang sangat tajam dalam pemerintahan baik di tingkat kecamatan maupun desa, yang berarti peranan perempuan jauh lebih rendah daripada pria di bidang tersebut.

7.3 Keamanan

Masalah peradilan bukan masalah hukum saja, melainkan masalah perilaku manusia terutama aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Probowati (1996;2001) mengatakan ada lima factor yang mempengaruhi putusan hukuman, yaitu (1) hakim, misalnya kepribadian, suasana hati, intelegensi, (2) opini public yang tertulis dalam media massa ketika sidang tengah berlangsung, (3) pengacara, misalnya kinerja, jenis kelamin, dan gaya bicara yang meyakinkan, (4) tuntutan jaksa, dan (5) terdakwa, misalnya, jenis kelamin, ras, status social ekonomi, dan kemampuan bicara.

Tabel di bawah ini menggambarkan jumlah aparat penegak hukum di Kabupaten Serang Tahun

2011 dan pelaku serta korban tindak kejahatan, sebagai berikut:

Tabel 7.5 Jumlah Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Serang Tahun 2011

Aparat Penegak Hukum	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Polisi	1139	24	1163
Hakim	5	9	14
Jaksa	14	9	23

Sumber: Survei Polkam BPS

Perbedaan jumlah polisi antara laki-laki dan perempuan berbeda sangat signifikan, polisi laki-laki berjumlah 1.139 orang dan perempuan hanya 24 orang saja atau terdapat hanya 1 polisi perempuan diantara 48 polisi laki-laki. Untuk profesi hakim, jumlah hakim perempuan lebih banyak daripada hakim laki-laki sedangkan jaksa, jumlah laki-laki masih lebih banyak daripada perempuan.

Menurut Kunarto (1997) ada dua karakteristik yang digunakan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan yaitu umur dan jenis kelamin. Perbandingan pelanggar laki-laki dibanding pelanggar perempuan cukup konsisten sesuai dengan penemuan kriminologi bahwa jumlah penjahat-penjahat laki-laki yang tercatat jauh melebihi jumlah dari wanita.

Tabel 7.6 Jumlah Pelaku dan Persentase Korban Tindak Kejahatan di Kabupaten Serang Tahun 2011

Golongan Usia	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pelaku tindak kejahatan			
Dewasa	210	88	298
Anak-anak	40	4	44
Persentase korban kejahatan			
Dewasa	2,43	0,73	1,59
Anak-anak	1,68	0,5	1,11

Sumber: Survei Polkam BPS

Di Kabupaten Serang tahun 2011, pelaku tindak kejahatan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan, yaitu 250 laki-laki (210 orang dewasa dan 40 anak-anak) dan 92 perempuan (88 usia dewasa dan 4 anak-anak). Beberapa penelitian mengatakan bahwa dalam proses peradilan pidana, terdapat diskriminasi yang menyangkut seluruh system yang lebih menguntungkan perempuan, sehingga kaum laki-laki akan lebih tinggi kemungkinannya untuk masuk penjara daripada perempuan.

Untuk korban kejahatan, masih laki-laki juga yang lebih banyak daripada perempuan, sepanjang tahun 2011 di Kabupaten Serang terdapat 2,43 persen korban kejahatan laki-laki dewasa, 0,73 persen perempuan dewasa, 1,68 persen anak-anak laki, dan hanya 0,5 persen anak-anak perempuan.

7.4 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Perubahan yang terjadi pada setiap bidang pembangunan, akan saling memengaruhi dan berdampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Fungsi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Tabel 7.7 Jumlah permasalahan sosial menurut jenisnya di Kabupaten Serang Tahun 2011

Permasalahan Sosial	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Balita terlantar	373	235	608
Anak terlantar	1.407	1.025	2.432
Anak Nakal	34	20	54
Anak Jalanan	3	-	3
Lansia terlantar	1.454	4.007	5.461
Penyandang cacat	3.002	2.321	5.323
Pengemis	26	7	33
Gelandangan	70	1	71
Mantan Narapidana	28	-	28
Korban Narkoba	31	5	36
Rumah tidak layak huni			12.733
Keluarga bermasalah sosial psikologis			164
Wanita rawan sosial ekonomi		5.684	5.684
Keluarga rentan			4.029

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Serang

Permasalahan sosial seperti data di atas tidak akan besar jumlahnya apabila faktor ekonomi masyarakat sudah cukup baik. Penyandang masalah kesejahteraan sosial ini

adalah mereka yang terkena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

BAB VIII INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Pencapaian pembangunan umumnya termanifestasi dengan adanya perubahan menuju kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Perubahan pada konteks ini mencakup peningkatan/penurunan kualitas hidup manusia secara fisik maupun non fisik sebagai dampak berbagai program pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian pembangunan di suatu wilayah diperlukan ukuran yang mampu memberikan gambaran menyeluruh dari capaian pembangunan.

Berbagai metode telah banyak digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan. Namun persoalannya, apakah metode itu dapat digunakan untuk membandingkan pencapaian pembangunan antar wilayah? Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada dasarnya dimaksudkan untuk menjawab

pertanyaan semacam itu. Perlu dipahami bahwa IPM sebagaimana indeks komposit lainnya disusun untuk memberikan gambaran tentang realitas kompleks manusia. Meski demikian, IPM bukan tanpa kelemahan karena belum mencakup semua aspek pembangunan manusia apalagi jika dikaitkan dengan aspek spiritual yang sama pentingnya dengan aspek material.

Indikator Pembangunan Manusia yang terkait dengan gender dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Perbedaan antara IPM dengan IPG dapat menggambarkan bias gender dalam kualitas hidup atau terjadi ketidak setaraan gender dalam pembangunan. Selanjutnya untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian dalam pemberdayaan gender dapat diukur dengan Indeks Pemberdayaan Gender.

8.1 Pencapaian Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia di Kabupaten Serang selama ini menunjukkan peningkatan. Peningkatan pembangunan manusia dipresntasikan oleh angka IPM. Tercatat pada tahun 2011 angka IPM kabupaten Serang sebesar 69,33.

Indikator harapan hidup dapat digunakan untuk mengukur pembangunan di bidang kesehatan. Meningkatnya angka harapan hidup dapat berarti adanya perbaikan pembangunan di bidang kesehatan yang biasanya ditandai dengan membaiknya kondisi social ekonomi penduduk, membaiknya keshatan, lingkungan dan lain sebagainya.

Secara umum, usia harapan hidup Kabupaten Serang menunjukkan kenaikan dari 63,51 tahun pada tahun 2010 meningkat menjadi 63,88 Artinya peluang hidup penduduk Kabupaten Serang bertambah 0,37 tahun, atau dapat dikatakan rata-rata bayi yang lahir di Kabupaten Serang pada tahun 2011 diharapkan dapat hidup sampai usia

sekitar 64 tahun. Bila dibandingkan dengan angka Provinsi Banten pada tahun 2011 yang telah mencapai 65,05 tahun, angka harapan hidup penduduk Kabupaten Serang relatif masih sangat rendah. Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah-langkah yang tepat untuk merumuskan program di bidang kesehatan.

Indikator tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk dewasa (usia 15 tahun ke atas) dapat menggambarkan tingkat keberhasilan dan perkembangan pembangunan di bidang pendidikan. Dua indikator ini dipandang dapat mengukur tingkat pengetahuan masyarakat, sehingga digunakan dalam penghitungan IPM sebagai indikator derajat pendidikan masyarakat.

Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang buta huruf atau belum dapat membaca dan menulis di Kabupaten Serang relatif sedikit, bahkan angkanya cenderung stagnan jika dibanding tahun sebelumnya. Terlihat dari besarnya

penduduk yang melek huruf sebanyak 95,7 persen. Artinya masih terdapat 4 orang dari setiap 100 penduduk usia di atas 15 tahun yang belum dapat membaca dan menulis. Secara umum, kenyataan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat Kabupaten Serang sudah mulai sadar untuk menyekolahkan anak-anaknya minimal sampai bisa membaca dan menulis.

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Rata-rata lama sekolah yaitu rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah diikuti. Untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah pemerintah telah mencanangkan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan dasar hingga tingkat SLTP.

Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Serang hanya mencapai 7,25 tahun dengan indeks sebesar 48,33. Indeks rata-rata lama sekolah sebesar 48,33 persen yang berarti rata-rata tingkat pendidikan formal penduduk Kabupaten Serang belum mencapai setengah dari seluruh lama pendidikan ideal yang mesti dijalani yaitu 15 tahun (100 persen). Kondisi di atas juga menggambarkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Serang masih relatif rendah.

Pengukuran komponen daya beli didekati dengan besarnya konsumsi per kapita yang telah disesuaikan. Pemakaian variabel konsumsi riil dimaksudkan untuk mengeliminir perbedaan dan perubahan harga (inflasi) yang terjadi sehingga angka yang dihasilkan dapat dibandingkan antar daerah dan antar waktu. Konsumsi riil per kapita penduduk Kabupaten Serang Tahun 2011 sebesar 633.720 rupiah. Rendahnya daya beli masyarakat terkait dengan masih banyaknya masyarakat yang tinggal di

perdesaan dan otomatis masih dominannya sektor pertanian yang biasanya nilai tambah sektor ini rendah sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan.

8.2 Pencapaian Pembangunan Gender

Pada dasarnya hakekat pembangunan ditujukan untuk kesejahteraan seluruh penduduk dengan tidak membedakan suku, agama, asal, maupun jenis kelamin. Meski demikian, pembangunan yang dilaksanakan disinyalir masih bermuatan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Ditenggarai, pembangunan yang dilaksanakan di segala bidang lebih banyak menguntungkan laki-laki. Tentunya untuk menjawab hal ini tidak mudah, perlu kajian mendalam terhadap keseluruhan aspek pembangunan.

Salah satu cara untuk mengetahui adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, yaitu menilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan mempertimbangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM

mengukur rata-rata pencapaian pembangunan secara umum sehingga perbedaan tingkat pencapaian pembangunan manusia yang dicapai laki-laki dan perempuan tidak terlihat. Sedangkan IPG mengukur tingkat pencapaian dalam kemampuan dasar sama dengan IPM, namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender. Dengan demikian jika nilai IPG lebih rendah dari IPM maka terjadi ketimpangan gender.

Tabel 8.1 Komponen Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Serang Tahun 2011

Komponen IPG	Pr	Lk	Pr+Lk
(1)	(2)	(3)	(4)
Proporsi Penduduk (%)	49,1	50,9	100
Angka Harapan Hidup (tahun)	65,46	61,67	63,88
Angka Melek huruf (%)	93,95	98,02	95,72
Rata - rata lama sekolah (tahun)	6,66	8,02	7,25
Kontribusi Pendapatan (%)	24,75	75,25	100

Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 65,46 tahun dan 61,67 tahun. Alasan mengapa perempuan lebih berumur panjang adalah bahwa perempuan secara biologis memiliki beberapa keunggulan seperti perempuan memiliki dua kromosom X laki-laki hanya satu, hormon estrogen lebih melindungi perempuan secara alami dibanding hormon testosteron laki-laki dan perubahan kondisi tubuh perempuan sepanjang hidupnya (menstruasi, kehamilan, melahirkan, menopause) membuat tubuh mereka secara internal lebih tahan banting.

Walaupun perempuan lebih mempunyai peluang berumur panjang tapi dari sisi pendidikan dan kontribusi terhadap ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Penduduk 15 tahun keatas yang sudah melek huruf hanya 93,95 persen saja dan rata-rata lama sekolahnya Cuma 6,66 tahun sedangkan kontribusi pendapatannya hanya 24,75 persen saja.

Nilai IPG Kabupaten Serang tahun 2011 sebesar 57,44 dimana nilai masing-masing indikator komponennya adalah sebagai berikut: Indeks Angka Harapan Hidup laki-laki 65,28 dan perempuan 63,27, Indeks Melek Huruf laki-laki 98,02 dan perempuan hanya 93,95, Indeks Rata-rata lama sekolah laki-laki 53,47 dan perempuan 44,40 sedangkan kontribusi pendapatan perempuan masih jauh dibandingkan laki-laki.

Tabel 8.2 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Komponen Pembentuknya di Kabupaten Serang Tahun 2011

Komponen IPG	Pr	Lk
(1)	(2)	(3)
Indeks Angka Harapan Hidup	63,27	65,28
Indeks Melek Huruf	93,95	98,02
Indeks Rata-rata lama Sekolah	44,40	53,47
% Kontribusi Pendapatan	24,75	75,25
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	57,44	

8.3 Hubungan antara IPM dan IPG

Bersama-sama dengan IPM, IPG dapat menggambarkan kesetaraan dalam capaian pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan IPM, nilai IPG dihitung dengan mempertimbangkan capaian laki-laki dan perempuan, sehingga selisih antara keduanya akan menggambarkan tingkat kesetaraan gender. Jika nilai IPM sama dengan IPG menunjukkan bahwa tidak terjadi ketimpangan pencapaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Sebaliknya nilai IPG di bawah nilai IPM berarti terjadi ketimpangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Semakin kecil selisih nilai IPM dan IPG menunjukkan semakin kecil perbedaan capaian pembangunan perempuan dan laki-laki. Sebaliknya semakin besar selisih nilai IPM dan IPG menunjukkan semakin besar jarak (gap) capaian pembangunan perempuan dan capaian pembangunan

laki-laki. Indikator ini dapat menunjukkan seberapa jauh kesetaraan gender di suatu wilayah.

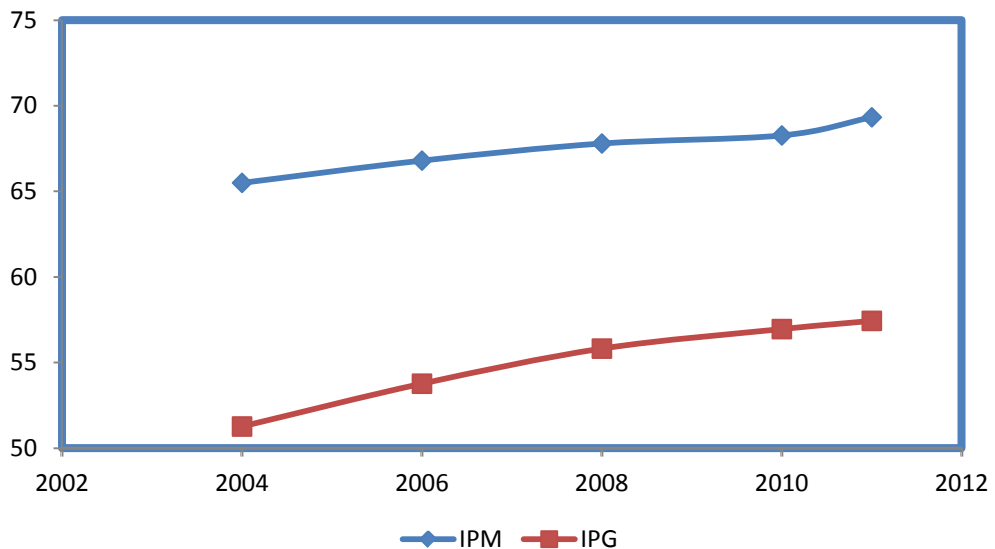
Tabel 8.3 Perkembangan IPG dan IPM Kabupaten Serang Tahun 2002-2011

Tahun	IPM	IPG	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)
2002	63,69	-	-
2004	65,50	51,27	14,23
2006	66,80	53,77	13,03
2008	67,80	55,82	11,98
2010	68,27	56,96	11,31
2011	69,33	57,44	11,89

Secara umum, tabel di atas menggambarkan selisih (gap) antara nilai IPM dan IPG yang cenderung semakin mengecil. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pengurangan ketimpangan gender di Kabupaten Serang. Walaupun semakin mengecil tapi masih perlu kerja keras

untuk meningkatkan capaian pembangunan manusia secara umum.

Grafik 8.1 Perkembangan IPM dan IPG Kabupaten Serang Tahun 2004-2011



Namun dibalik kenaikan nilai IPM dan IPG tersebut masih menyisakan pertanyaan mengapa masih terjadi kesenjangan atau ketidaksetaraan gender yang dapat dilihat dari selisih (gap) yang tercipta antara nilai IPM dan IPG. Jika berbicara tentang ketidaksetaraan

gender maka termasuk didalamnya pemikiran mengenai bagaimana memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk berbuat maksimal dalam kehidupan. Salah satu upayanya adalah berbuat maksimal untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, proses pengambilan keputusan baik di bidang politik maupun penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 8.4 Perkembangan IPM dan IPG Kabupaten/Kota se Provinsi Banten tahun 2004-2011

Kabupaten/Kota	2004		2007		2010		2011	
	IPM	IPG	IPM	IPG	IPM	IPG	IPM	IPG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pandeglang	66,21	48,14	67,39	58,73	68,29	60,75	68,77	61,25
Lebak	65,78	46,80	66,74	58,81	67,67	60,34	67,98	60,92
Tangerang	69,10	56,91	70,71	60,16	71,76	61,75	72,05	62,11
Serang	65,50	51,27	67,45	55,63	68,67	56,96	69,33	57,44
Kota Tangerang	73,82	63,07	74,40	65,87	75,17	67,67	75,44	68,13
Kota Cilegon	73,53	52,58	74,43	56,60	75,29	58,01	75,60	58,44
Kota Serang	-	-	-	-	70,61	60,71	71,45	61,34
Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	75,38	62,14	76,01	62,82
Prov. Banten	68,80	56,75	69,29	61,40	70,48	62,88	70,95	63,35

Tabel IPG dan IPM di atas memperlihatkan bahwa IPM Kabupaten Serang lebih baik dari Pandeglang dan Lebak tapi Angka IPGnya lebih kecil dari Pandeglang dan Lebak. Angka IPM Kabupaten Serang menduduki peringkat 5 terbesar tapi Angka IPG menempati rangking terakhir dibandingkan kabupaten/kota lainnya.

8.4 Rekomendasi

Bidang Kesehatan

- a. Diperlukan adanya perhatian pemerintah dan masyarakat tentang kondisi ibu melahirkan
- b. Diperlukan adanya pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi, terutama pelayanan kehamilan dan membuat kehamilan yang aman bebas resiko tinggi (*making pregnancy safety*), program peningkatan jumlah kelahiran yang dibantu oleh tenaga kesehatan, penyiapan sistem rujukan dalam penanganan komplikasi kehamilan, penyiapan

keluarga dan suami siaga dalam menyongsong kelahiran, yang semuanya bertujuan mengurangi jumlah kematian ibu dan meningkatkan derajat kesehatan reproduksi.

- c. Diperlukan adanya perhatian pemerintah dan masyarakat tentang kondisi kesehatan ibu hamil
- d. Beberapa instansi di lingkungan pemerintah yang belum memiliki data terpilah diharapkan segera menyusun data secara terpilah agar dapat diperoleh data kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan.

Bidang Pendidikan

- ✓ Partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan perlu ditingkatkan agar kualitas sumber daya perempuan semakin baik.
- ✓ Memperluas akses dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat tanpa

membedakan jenis kelamin dan peningkatan daya saing pendidikan

- ✓ Meningkatkan lama sekolah sesuai usia sekolah menuju pencapaian wajar 12 tahun
- ✓ Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan
- ✓ Menyediakan akses jalan dan angkutan ke sekolah-sekolah terutama pada jenjang sekolah menengah
- ✓ Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan

Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

- a. Perlu adanya standar kerja untuk pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan kerja.
- b. Membina dan mengembangkan keterampilan serta semangat dan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat

terutama bagi perempuan agar terwujud masyarakat yang mandiri dan kompetitif

- c. Perlu adanya standar upah gaji yang "setara dan adil" antara laki-laki dan perempuan
- d. Mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada ekonomi lokal (ekonomi kerakyatan)
- e. Membina dan mengembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan dalam masyarakat agar terwujud masyarakat yang mandiri dan kompetitif